

PROFIL
KECAMATAN RESPONSIF GENDER (KRG)
SINERGI DENGAN KELURAHAN RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA)



KECAMATAN SAWAHAN
KOTA SURABAYA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Kecamatan Responsif Gender (KRQ) Sinergi dengan KRPPA sesuai 5 Komponen PUG (Penguatan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Kecamatan dengan Kelurahan Responsif Gender mendukung berwujudnya Kecamatan Responsif Gender sinergi dengan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Kecamatan kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kecamatan dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 19 Juli 2023


GABUT SARAHAN

AMIR HIDAYAT, ST
Pembina
NP. 187602263661121604

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	xx
BAB II. PROFIL KECAMATAN DAN PELEMBAGAAN PUG	xx
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	xx
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN KECAMATAN RESPONSIF GENDER (KRG) SINDROM DENGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA)	xx
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	xx
BAB VI. PENUTUP	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhatikan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);

3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Kecamatan Ramah Perempuan dan peduli Anak;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77);
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA;
9. Pembentukan Forum PUSPA Grihandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3/2008/436.1.2/2020.

1.3. Tujuan KRG

Pelaksanaan Kecamatan Responsif Gender Sinergi dengan Kelurahan Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendukung pencapaian terwujudnya kecamatan dan kelurahan responsif gender Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai 10 indikator DKRPPA dan kumenPPPA;
2. Mewujudkan Kecamatan responsif gender sebagai model yang baik (*good practice*) dalam mewujudkan keadilan Gender, disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;
3. Melaksanakan evaluasi strategi pencapaian PUG di Kecamatan beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025;
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025.

BAB II

PROFIL KECAMATAN DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum Kecamatan

Sejarah Kecamatan Kota Sumbawa memiliki 31 Kecamatan yang dimana salah satunya adalah Kecamatan Sawahan. Kecamatan Sawahan wilayah yang memiliki penduduk terbanyak nomor dua yang terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Paik, Putat Jaya, Banyu Urip, Palamca, Kupang Krajan, dan Sawahan. Penduduk terbanyak di Kecamatan Sawahan yaitu di Kelurahan Putat Jaya dan Kelurahan Banyu Urip. Masing-masing Kelurahan memiliki beberapa sejarahnya seperti Kelurahan Banyu Urip disebut Banyu Urip yang artinya air hidup, dimana terdapat air yang selalu keluar terus di Puskemas Banyu Urip. Sedangkan Putat Jaya yang dimana dulu berkarat menjadi kawasan eks Lokalisasi Dolly yang saat ini sudah dilakukan revitalisasi dengan menutup Lokalisasi Dolly pada 18 Juni 2014 saat pemerintahan Walikota Tri Rismaharini. Kecamatan Sawahan memiliki beberapa wisata religi yang sampai saat ini masih menjadi ikon di Kecamatan Sawahan yaitu Makam Mbah Karmah di Wilayah Kelurahan Paik.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan.

b. Misi

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Sumbawa sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun sumberdaya manusia (SDM) unggul, sehat, jomari dan rahani, produktif serta berkeadilan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan keadilan hukum yang berkeadilan.

c. Motto

Kecamatan Sawahan "Tidak Ada Matinya!!"

2.2. Demografi

Keterangan lokasi dan batas wilayah

Kecamatan Sawahan berkedudukan di Surabaya bagian selatan yang berbatasan Jalan Raya Dukuh Kuning No. 63-A Surabaya. Luas wilayah di Kecamatan Sawahan meliputi enam Kelurahan yang dimana memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Luas wilayah terbesar yaitu Kelurahan Pakis sedangkan luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Kuning Krajan berikut data luas wilayah Kecamatan Sawahan : Kecamatan Sawahan memiliki luas 6,93 Km² , Pakis 2,47 Km², Putih Jaya 0,7202 Km², Banyu Urip 0,96 Km², Kuning Krajan 0,80 Km², Pitaman 1,35 Km², Sawahan 0,8298 Km². Batas wilayah Kecamatan Sawahan yaitu Sebelah Utara ada Kecamatan Bubutan dan Kecamatan Asemrowo untuk Selatan Timur Kecamatan Tegayutan dan Kecamatan Wirokromo, Sebelah Selatan Kecamatan Dukuh Pakis, Sebelah itu Sebelah Barat Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Dukuh Pakis. Kondisi Geografi Kecamatan Sawahan yaitu terletak di dataran dengan lingkungan sekitar 4 meter di atas permukaan laut.

Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan



2.4 Pembagian Pengeresutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kecamatan dengan wilayah kelurahannya memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif. Mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan PUG mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Walikota Surabaya untuk mengikuti kebijakan yang dibuat untuk kelurahan PUG. Perlu kebijakan dari pemangku kepentingan dengan tujuan pelaksanaan pembangunan dan penganggaran yang responsif Gender terarah dan mempunyai kekuatan hukum/pemenuhan yang jelas sesuai dengan surat perintah dan surat keputusan yang ada. Berikut kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam penyusunan PUG :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 3336);

2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007, Nomor 82 LNRI Nomor 4732).
3. Peraturan Pemerintah (Mendagri) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
4. Focal Point PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit kerja masing-masing SKPD.
5. Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1950 dengan UU No.8 Tahun 1967 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan Perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615).
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Unit/Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55).
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4.2 Socialisasi PUG

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilaksanakan melalui integrasi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang digerakkan melalui APBD dan juga swadaya. Pelaksanaan PUG harus terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dibuat di seluruh lembaga Pemerintah baik pusat

stasiun tanah, orientasi profesi, lingkungan masyarakat dan lainnya untuk memenuhi responst gender. Mengingat pengarusutamaan gender masih banyak masyarakat kurang memahami hal-hal tersebut maka pentingnya informasi dan pengetahuan serta kebijakan yang sudah ada untuk di sosialisasikan kepada masyarakat, organisasi, Lembaga, hingga tingkat yang lebih tinggi lagi agar memastikan tidak adanya diskriminasi gender saat ini.

Kegiatan sosialisasi PUG oleh Focal Point/Tim kepada pimpinan dan seluruh anggota terutama lin teknis, pelaksana serta pemantau/monev program dan termasuk kepada Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh focal point masih belum terlaksana pada tahun ini, tetapi kegiatan terkait pengarusutamaan gender seperti sosialisasi mengenai Kesehatan, sosialisasi di Pasopas mengenai pola asuh orang tua dan juga korsepting, sosialisasi bahaya narkoba, Sosialisasi pengentangan usaha, dan lain lain.

Kegiatan Rapat Koordinasi Terkait PUG

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT MASYARAKAT DIREKTORAT BINA SAHABAT MASYARAKAT	Nomor : Tanggal :
Kepada Yth :	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Di Tempat
Dengan Hormat :	Menindaklanjuti surat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota No. tanggal .../.../...	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa
Adapun hal yang kami sampaikan adalah :	1. ...	2. ...
Demikian surat ini kami sampaikan.	Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.	Demikian surat ini kami sampaikan.
Hormat kami,	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)

[illegible]

RESUME RAPAT

Topik: ...
Waktu: ...
Tempat: ...
Anggota: ...

...
 ...
 ...

...
 ...



Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Usaha UMKM

The diagram illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, looking at a screen. On the screen, there is a 'Starting point' (a large circle) and a 'Target' (a small circle). A hand is shown moving from the starting point towards the target. The diagram is labeled with 'Target' and 'Starting point'.

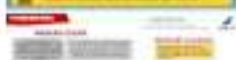
SATU-SATU

No.	Nama	Alamat	Telepon
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...
4.	...	...	...
5.	...	...	...
6.	...	...	...
7.	...	...	...
8.	...	...	...
9.	...	...	...
10.	...	...	...
11.	...	...	...
12.	...	...	...
13.	...	...	...
14.	...	...	...
15.	...	...	...
16.	...	...	...
17.	...	...	...
18.	...	...	...
19.	...	...	...
20.	...	...	...
21.	...	...	...
22.	...	...	...
23.	...	...	...
24.	...	...	...
25.	...	...	...
26.	...	...	...
27.	...	...	...
28.	...	...	...
29.	...	...	...
30.	...	...	...
31.	...	...	...
32.	...	...	...
33.	...	...	...
34.	...	...	...
35.	...	...	...
36.	...	...	...
37.	...	...	...
38.	...	...	...
39.	...	...	...
40.	...	...	...
41.	...	...	...
42.	...	...	...
43.	...	...	...
44.	...	...	...
45.	...	...	...
46.	...	...	...
47.	...	...	...
48.	...	...	...
49.	...	...	...
50.	...	...	...
51.	...	...	...
52.	...	...	...
53.	...	...	...
54.	...	...	...
55.	...	...	...
56.	...	...	...
57.	...	...	...
58.	...	...	...
59.	...	...	...
60.	...	...	...
61.	...	...	...
62.	...	...	...
63.	...	...	...
64.	...	...	...
65.	...	...	...
66.	...	...	...
67.	...	...	...
68.	...	...	...
69.	...	...	...
70.	...	...	...
71.	...	...	...
72.	...	...	...
73.	...	...	...
74.	...	...	...
75.	...	...	...
76.	...	...	...
77.	...	...	...
78.	...	...	...
79.	...	...	...
80.	...	...	...
81.	...	...	...
82.	...	...	...
83.	...	...	...
84.	...	...	...
85.	...	...	...
86.	...	...	...
87.	...	...	...
88.	...	...	...
89.	...	...	...
90.	...	...	...
91.	...	...	...
92.	...	...	...
93.	...	...	...
94.	...	...	...
95.	...	...	...
96.	...	...	...
97.	...	...	...
98.	...	...	...
99.	...	...	...
100.	...	...	...

SATU-SATU

No.	Nama	Alamat	Telepon
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...
4.	...	...	...
5.	...	...	...
6.	...	...	...
7.	...	...	...
8.	...	...	...
9.	...	...	...
10.	...	...	...
11.	...	...	...
12.	...	...	...
13.	...	...	...
14.	...	...	...
15.	...	...	...
16.	...	...	...
17.	...	...	...
18.	...	...	...
19.	...	...	...
20.	...	...	...
21.	...	...	...
22.	...	...	...
23.	...	...	...
24.	...	...	...
25.	...	...	...
26.	...	...	...
27.	...	...	...
28.	...	...	...
29.	...	...	...
30.	...	...	...
31.	...	...	...
32.	...	...	...
33.	...	...	...
34.	...	...	...
35.	...	...	...
36.	...	...	...
37.	...	...	...
38.	...	...	...
39.	...	...	...
40.	...	...	...
41.	...	...	...
42.	...	...	...
43.	...	...	...
44.	...	...	...
45.	...	...	...
46.	...	...	...
47.	...	...	...
48.	...	...	...
49.	...	...	...
50.	...	...	...
51.	...	...	...
52.	...	...	...
53.	...	...	...
54.	...	...	...
55.	...	...	...
56.	...	...	...
57.	...	...	...
58.	...	...	...
59.	...	...	...
60.	...	...	...
61.	...	...	...
62.	...	...	...
63.	...	...	...
64.	...	...	...
65.	...	...	...
66.	...	...	...
67.	...	...	...
68.	...	...	...
69.	...	...	...
70.	...	...	...
71.	...	...	...
72.	...	...	...
73.	...	...	...
74.	...	...	...
75.	...	...	...
76.	...	...	...
77.	...	...	...
78.	...	...	...
79.	...	...	...
80.	...	...	...
81.	...	...	...
82.	...	...	...
83.	...	...	...
84.	...	...	...
85.	...	...	...
86.	...	...	...
87.	...	...	...
88.	...	...	...
89.	...	...	...
90.	...	...	...
91.	...	...	...
92.	...	...	...
93.	...	...	...
94.	...	...	...
95.	...	...	...
96.	...	...	...
97.	...	...	...
98.	...	...	...
99.	...	...	...
100.	...	...	...

No.	Nama	Alamat	Telepon
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...
4.	...	...	...
5.	...	...	...
6.	...	...	...
7.	...	...	...
8.	...	...	...
9.	...	...	...
10.	...	...	...
11.	...	...	...
12.	...	...	...
13.	...	...	...
14.	...	...	...
15.	...	...	...
16.	...	...	...
17.	...	...	...
18.	...	...	...
19.	...	...	...
20.	...	...	...
21.	...	...	...
22.	...	...	...
23.	...	...	...
24.	...	...	...
25.	...	...	...
26.	...	...	...
27.	...	...	...
28.	...	...	...
29.	...	...	...
30.	...	...	...
31.	...	...	...
32.	...	...	...
33.	...	...	...
34.	...	...	...
35.	...	...	...
36.	...	...	...
37.	...	...	...
38.	...	...	...
39.	...	...	...
40.	...	...	...
41.	...	...	...
42.	...	...	...
43.	...	...	...
44.	...	...	...
45.	...	...	...
46.	...	...	...
47.	...	...	...
48.	...	...	...
49.	...	...	...
50.	...	...	...
51.	...	...	...
52.	...	...	...
53.	...	...	...
54.	...	...	...
55.	...	...	...
56.	...	...	...
57.	...	...	...
58.	...	...	...
59.	...	...	...
60.	...	...	...
61.	...	...	...
62.	...	...	...
63.	...	...	...
64.	...	...	...
65.	...	...	...
66.	...	...	...
67.	...	...	...
68.	...	...	...
69.	...	...	...
70.	...	...	...
71.	...	...	...
72.	...	...	...
73.	...	...	...
74.	...	...	...
75.	...	...	...
76.	...	...	...
77.	...	...	...
78.	...	...	...
79.	...	...	...
80.	...	...	...
81.	...	...	...
82.	...	...	...
83.	...	...	...
84.	...	...	...
85.	...	...	...
86.	...	...	...
87.	...	...	...
88.	...	...	...
89.	...	...	...
90.	...	...	...
91.	...	...	...
92.	...	...	...
93.	...	...	...
94.	...	...	...
95.	...	...	...
96.	...	...	...
97.	...	...	...
98.	...	...	...
99.	...	...	...
100.	...	...	...





2.4.3 SDM Terlatih PUG

Jumlah dan Persentase SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG, SDM Teknis, SDM Pelaksana, Evaluasi dan Pelaporan Terlatih PUG, SDM Aparat Penegak Hukum (buat tabel)

No	Bagian SDM Terlatih	Jumlah SDM	Persentase SDM
1	SDM Perencana		
2	SDM Penganggaran PUG		
3	SDM Teknis		
4	SDM Pelaksana		
5	SDM Evaluasi		
6	SDM Pelaporan		
7	SDM Aparat Penegak Hukum		

Apakah Kecamatan memiliki gender champions dari unsur ASN dan Non ASN Masyarakat?

Gender Champion adalah seseorang di internal kecamatan dan jejaringnya yang memiliki pengaruh kepedulian dan secara aktif mempromosikan serta menggerakkan pihak-pihak lain untuk ikut terlibat dalam mendorong penyelenggaraan PUG dan pencapaian kesetaraan gender di Kecamatan, ditunjukkan dengan melampirkan bukti berupa SK penunjukan dan/atau bukti pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

Gender Champion kecamatan dengan wilayah kerjanya

Focal Point PUG

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan memiliki focal point PUG? Dibuat format dilampirkan berupa No. SK/lnk.

Pokja PUG

Kecamatan dengan wilayah kerjanya menjadi bagian dalam kelompok kerja (POKJA) PUG melalui apa? (sebutkan SK, Keempatnya, Dokumentasi).

Muatan Rencana Kerja Kecamatan untuk PUG ditinjau secara garis besar

Perempuan yang menduduki jabatan eselon di Kecamatan dan Wilayah Kelurahan

- Jumlah dan Persentase Perempuan yang menjabat eselon II, III
- Jumlah dan persentase perempuan yang menjabat eselon IV

Penyusunan kegiatan sosialisasi/ internalisasi PUG di lingkup Internal Kecamatan dan wilayah kelurahan?

- Dilampirkan dalam bentuk sbb :
 - Sosialisasi (lampirkan laporan kegiatan meliputi undangan, daftar hadir, foto, resume/ modul pertemuan) dengan link
 - Pelatihan (lampirkan laporan kegiatan) dengan link
 - Lainnya (lampirkan laporan kegiatan)

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya terlampir sebagai berikut (1 and 10)

1. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Sumber Daya Manusia

No	JENIS KETENAGAAAN	ASN/MON ASN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Kecamatan Sawahan	ASN	10	5	25
2	Kecamatan Sawahan	Non ASN	18	6	24
3	Kelurahan Pesoman	ASN	8	2	8
4	Kelurahan Pelenah	Non ASN	1	7	14
5	Kelurahan Sawahan	ASN	4	3	7
6	Kelurahan Sawahan	Non ASN	3	5	13
7	Kelurahan Banyu Uno	ASN	3	2	5
8	Kelurahan Banyu Uno	Non ASN	6	6	12
9	Kelurahan Pulau Jaya	ASN	8	2	8
10	Kelurahan Pulau Jaya	Non ASN	10	3	13
11	Kelurahan Kumpang Krajan	ASN	4	3	7
12	Kelurahan Kumpang Krajan	Non ASN	8	6	12
13	Kelurahan Pakis	ASN	3	4	7
14	Kelurahan Pakis	Non ASN	4	5	13
	JUMLAH		100	60	160

2. Jumlah Jejaring

Jumlah jejaring di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Jejaring

KELOMPOK	JUMLAH RW, RT, dan Pengurus				TOTAL	
	L	%	P	%	L + P	%
Pakis	1008	77,3%	435	22,4%	1443	100%
Pondok Jaya	1347	54,2%	1115	45,7%	2462	100%
Banyu Urip	1205	63,2%	695	36,8%	1900	100%
Pedemasan	1148	69,5%	504	30,5%	1652	100%
Kandang Kropak	980	73,7%	317	24,2%	1297	100%
Sawahan	934	75,1%	310	24,9%	1244	100%
TOTAL	5622	68,8%	2566	31,2%	8188	100%

KELOMPOK	JUMLAH WONG				TOTAL	
	L	%	P	%	L + P	%
Pakis	10	52%	9	47%	19	100%
Pondok Jaya	15	55,6%	12	44,4%	27	100%
Banyu Urip	8	52,9%	7	47,1%	15	100%
Pedemasan	13	50%	13	50%	26	100%
Kandang Kropak	7	58%	5	42%	12	100%
Sawahan	8	63,3%	5	40,7%	13	100%
TOTAL	61	62,8%	36	37,2%	97	100%

KELUARANAN	JUMLAH K BH				TOTAL	
	L	%	P	%	L + P	%
Pakis	8	1,0%	482	99,0%	490	21,2%
Pulut Jaya	4	0,7%	552	99,3%	556	24,1%
Banyu Urip	4	1,0%	381	99,0%	385	16,7%
Pekemoh	10	2,2%	435	97,8%	445	19,3%
Kupang Krijan	-	0%	248	100%	248	10,8%
Sekawan	9	2,8%	176	97,2%	185	7,9%
TOTAL	28	7,7%	1274	92,3%	2002	100%

KELUARANAN	JUMLAH PKH				TOTAL	
	L	%	P	%	L + P	%
Pakis	0	0%	103	100%	103	16,5%
Pulut Jaya	0	0%	130	100%	130	21%
Banyu Urip	0	0%	100	100%	100	16,1%
Pekemoh	0	0%	141	100%	141	22,7%
Kupang Krijan	0	0%	70	100%	70	11,2%
Sekawan	0	0%	77	100%	77	12,3%
TOTAL	0	0%	621	100%	621	100%

KELUARANAN	JUMLAH LPKH				TOTAL	
	L	%	P	%	L + P	%
Pakis	1	100%	0	0%	1	16,67%
Pulut Jaya	1	100%	0	0%	1	16,67%
Banyu Urip	1	100%	0	0%	1	16,67%
Pekemoh	1	100%	0	0%	1	16,67%
Kupang Krijan	1	100%	0	0%	1	16,67%
Sekawan	0	0%	1	100%	1	16,67%
TOTAL	6	93,33%	1	16,67%	6	100%

KEKURAHAN	JUMLAH SATOKAL PPA				TOTAL	
	L	%	P	%	L+P	%
Pakis	8	27,1%	8	42,5%	14	15,1%
Pulut Jaya	1	3,2%	11	53,7%	12	17,2%
Banyu Urip	4	28,3%	10	71,4%	14	15,1%
Pekalongan	7	50%	7	50%	14	15,1%
Kupang Krayan	4	28,2%	10	71,4%	14	15,1%
Sawahan	8	38%	13	61,8%	21	22,6%
TOTAL	38	30,7%	67	81,5%	80	100%

KEKURAHAN	JUMLAH FORUM ANAK (USIA 10-18TH)				TOTAL	
	L	%	P	%	L+P	%
Pakis	11	52,3%	10	47,2%	21	18,4%
Pulut Jaya	6	28,0%	15	71,4%	21	18,4%
Banyu Urip	8	38%	13	62%	21	18,4%
Pekalongan	9	44,4%	10	50,0%	19	16,8%
Kupang Krayan	4	40%	5	50%	10	8,8%
Sawahan	9	34,7%	16	65,2%	25	21,2%
TOTAL	48	28,8%	68	80,8%	114	100%

KEKURAHAN	JUMLAH KARANG TARUNA				TOTAL	
	L	%	P	%	L+P	%
Pakis	10	36,1%	23	63,9%	33	17,1%
Pulut Jaya	12	33,3%	24	66,6%	36	17,1%
Banyu Urip	10	44,1%	19	55,2%	29	16,2%
Pekalongan	16	47%	18	52,0%	34	16,2%
Kupang Krayan	16	47%	18	52,5%	34	16,2%
Sawahan	15	41,7%	21	58,2%	36	17,1%
TOTAL	69	41,4%	125	68,6%	210	100%

1. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah populasi di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	KETERANGAN	JUMLAH PENDUDUK				TOTAL	
		L	%	P	%	L + P	%
1	Pria	17.802	48,3%	18.081	50,7%	35.882	17,0%
2	Pada Jaya	23.248	48,8%	23.556	50,2%	46.804	24,0%
3	Bony Urip	19.441	48,2%	19.933	50,7%	39.374	19,4%
4	Pedanan	17.434	48,8%	18.241	51,2%	35.675	17,0%
5	Kupang Krajan	11.488	48,2%	11.837	50,8%	23.325	11,5%
6	Sawahon	8.197	48,8%	8.107	50,5%	16.304	8,1%
	TOTAL	90.468	48,4%	121.028	50,8%	189.479	100%

b. Jumlah Penduduk Disabilitas

Jumlah penduduk disabilitas di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Disabilitas

No.	KETERANGAN	JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS				TOTAL	
		L	%	P	%	L + P	%
1	Pria	50	19,7%	22	17%	78	18,9%
2	Pada Jaya	57	20,1%	32	24,8%	89	21,8%
3	Bony Urip	77	27,2%	28	21,7%	105	25,5%
4	Pedanan	37	13%	24	18,0%	61	14,8%
5	Kupang Krajan	31	10,5%	14	10,0%	45	10,5%
6	Sawahon	25	8,8%	9	6,8%	34	8,3%
	TOTAL	283	88,1%	129	31,9%	412	100%

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk berdasarkan usia di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	USIA	JUMLAH				TOTAL	
		L	%	P	%	L + P	%
1	0-4 thn	5050	5,8%	5237	5,1%	10287	5,3%
2	5-12 thn	7403	7,5%	7131	7,1%	14534	7,3%
3	13-17 thn	8180	8,2%	7643	7,6%	15823	8,6%
4	18-24 thn	8007	8,2%	7793	7,7%	15800	8,2%
5	25-29 thn	7266	7,4%	7004	7%	14270	7,8%
6	30-34 thn	6982	6,7%	6725	6,6%	13707	7,3%
7	35-39 thn	6370	7,08%	7543	7%	14013	7,7%
8	40-44 thn	8200	8,3%	8824	8,4%	15793	8,2%
9	45-49 thn	7864	7,8%	7824	7,7%	15688	8,3%
10	50-54 thn	7157	7,2%	7593	7,5%	14747	8,1%
11	55-59 thn	5887	5,6%	6143	6,1%	12030	6,4%
12	60-64 thn	4188	4,2%	4611	4,6%	8799	5,0%
13	65-69 thn	3046	3,1%	3875	3,8%	6921	3,8%
14	70-74 thn	1919	2%	2542	2,5%	4461	2,4%
15	>75 thn	1985	2%	3822	3%	4807	2,7%
	JUMLAH	85.488	49,4%	101.020	50,5%	182.888	100%

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH				TOTAL	
		L	N	P	N	L + P	N
1	TK/SEDERAJAT	4878	7,4%	4723	8,7%	9600	7,0%
2	SD/SEDERAJAT	11681	17,7%	15703	29,2%	27384	20,1%
3	SMP/SEDERAJAT	11214	17,1%	12643	17,9%	23857	17,6%
4	SMA/SEDERAJAT	29139	44,2%	27724	51,4%	56862	41,7%
5	AKADEMI (DI-GS)	1278	1,9%	1818	2,3%	2692	2,1%
6	SARJANA (S1-GS)	7828	11,6%	7822	11,2%	15652	11,4%
	JUMLAH	86286	43,4%	78081	51,6%	159348	188%

e. Jumlah Penduduk berdasarkan angka data huruf

Data angka data huruf menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Jumlah penduduk Berdasarkan Angka Data Huruf

No.	URUS	JUMLAH				TOTAL	
		L	N	P	N	L + P	N
1	15-19 thn	0	0	0	0	0	0
2	20-24 thn	0	0	0	0	0	0
3	25-29 thn	0	0	0	0	0	0
4	30-34 thn	0	0	0	0	0	0
5	35-39 thn	0	0	0	0	0	0
6	40-44 thn	0	0	0	0	0	0
7	45-49 thn	0	0	0	0	0	0
8	50-54 thn	0	0	0	0	0	0
9	55-59 thn	0	0	0	0	0	0
10	>60 thn	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0

f. Jumlah penduduk berdasarkan angka putus sekolah

Data angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD terdapat jenis kelamin di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Data Angka Putus Sekolah Jenjang SD

No	KETERANGAN	SD				TOTAL	
		L	M	P	M	L + P	%
1	PAKIS	0	0%	0	0%	0	0%
2	PUTAT JAYA	0	0%	1	25,0%	1	25,0%
3	BANYU URIP	0	0%	0	0%	0	0%
4	PETERMON	0	0%	1	25,0%	1	25,0 %
5	KUPANG KRAJAN	1	25,0%	1	25,0%	2	50,0%
6	SAWAHAN	0	0%	0	0%	0	0%
	JUMLAH	1	25,0%	2	75,0%	4	100%

Tabel 5
Data Angka Putus Sekolah Jenjang SMP

No	KETERANGAN	SMP				TOTAL	
		L	M	P	M	L + P	%
1	PAKIS	1	25,0%	0	0%	1	25,0%
2	PUTAT JAYA	0	0%	0	0%	0	0%
3	BANYU URIP	1	25,0%	0	0%	1	25,0%
4	PETERMON	0	0%	0	0%	0	0 %
5	KUPANG KRAJAN	2	50,0%	0	0%	2	50,0%
6	SAWAHAN	0	0%	0	0%	0	0%
	JUMLAH	4	100%	0	0%	4	100%

Tabel 10
Data Angka Putus Sekolah Jenjang SMA

No	KETERANGAN	SLTA / Setengah				TOTAL	
		L	%	P	%	L+P	%
1	PAKIS	1	25,0%	1	25,0%	2	50,0%
2	PUTAT JAYA	0	0%	0	0%	0	0%
3	BANYU URP	0	0%	0	0%	0	0%
4	PETERMON	0	0%	0	0%	0	0%
5	KUPANG KRAJAN	1	25,0%	0	0%	1	25,0%
6	SAWAHAN	1	25,0%	0	0%	1	25,0%
	JUMLAH	2	75,0%	1	25,0%	4	100%

g. Jumlah penduduk berdasarkan angka perkawinan anak

Data perkawinan usia anak <19 tahun di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah Penduduk berdasarkan Data Perkawinan Anak

No.	WILAYAH	JUMLAH PERKAWINAN USIA ANAK			
		L	P	PENYERAB	TOTAL
		USIA	USIA		
1	PAKIS	0	0	0	0
2	PUTAT JAYA	0	0	0	0
3	BANYU URP	0	0	0	0
4	PETERMON	0	0	0	0
5	KUPANG KRAJAN	0	0	0	0
6	SAWAHAN	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0

B. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Data penduduk berdasarkan jumlah pekerjaan di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH				TOTAL	
		L	%	P	%	L + P	%
1	DIREKSI/LEGISLATIF	0	0%	0	0%	0	0%
1	PNS	1220	2,7%	264	5%	1484	3%
2	TNI	437	1%	1	0,01%	438	0,9%
3	POLRI	163	0,2%	0	0,01%	174	0,2%
4	Karyawan Swasta	35.447	70,1%	3.061	62,6%	38.508	77,7%
5	Pensiunan	578	1,3%	181	3%	759	1,4%
6	Wirausaha	6.070	10,0%	1.052	19,6%	7.122	14,1%
7	Dagang	36	0,1%	0	0,11%	42	0,88%
8	Harah	1	0,002%	0	0%	1	0,001%
9	Berkas	0	0%	0	0%	0	0%
10	JRT	0	0%	12	0,02%	12	0,02%
11	Sani	59	0,2%	0	0%	59	0,11%
12	Tukang	30	0,1%	0	0,00%	63	0,12%
13	Kuli	0	0%	0	0%	0	0%
14	Kasir	260	0,6%	96	1%	356	0,8%
15	Pekerja Migran	0	0%	0	0%	0	0%
16	UMKM	382	0,8%	143	2,9%	525	1,4%
17	LAINYA	129	0,3%	90	1,4%	219	0,4%
	JUMLAH	44862	100%	6546	100%	51408	100%

i. Jumlah Penduduk berdasarkan data perempuan kepala keluarga (PEKKA)

Jumlah penduduk berdasarkan data perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Jumlah Penduduk berdasarkan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

No.	WILAYAH	JENIS KELAMIN			Jumlah Perempuan			TOTAL
		GERAK	ELM NIKAH	DEMERJA	TIDAK	GAMIS	PRA	
1	PAKIS	2.305	388	888	3.525	83	27	3.644
2	PUTAT JAYA	2.529	444	908	3.845	22	1.457	11.068
3	BANYU URP	2.528	882	1045	3.185	23	1.835	10.142
4	PETERMON	2.335	634	885	4.652	18	901	8.374
5	KUP. KRAJAN	1.483	293	698	2.680	14	836	3.382
6	SAWAHAN	1.283	382	786	1.348	28	148	3.355
	Jumlah	13.788	2438	6348	34.433	188	3823	48.048

j. Jumlah Penduduk berdasarkan data organisasi perempuan dan perempuan wirausaha

Jumlah penduduk berdasarkan data organisasi perempuan dan perempuan wirausaha di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 14

Jumlah Penduduk berdasarkan Organisasi Perempuan dan Perempuan Wirausaha

NO	KELURAHAN	JUMLAH ORGANISASI PEREMPUAN	KET	JUMLAH PEREMPUAN WIRUSAHA	KET
1	PAKIS	1		1	
2	PUTAT JAYA	1		1	
3	BANYU URP	1		1	
4	PETERMON	1		1	

5	KUP KRAJAN	1		1	
6	SAWAHAN	1		1	
	JUMLAH	2		2	

8. Jumlah penduduk berdasarkan data pekerja anak

Data pekerja anak di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerja Anak

No	WILAYAH	PEKERJA ANAK (K15 TAHUN) Sektor Pertanian/ Perikanan, Kelautan, Perkebunan, Perkelakata, Jasa (ART, Kuli, Pengamen) dll			TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR			
		L	P	TOTAL	TIDAK	SD	SLTP	SLTA
1	PAKIS	0	0	0	0	0	0	0
2	PUTAT JAYA	0	0	0	0	0	0	0
3	BANYU UREP	0	0	0	0	0	0	0
4	PETEMON	0	0	0	0	0	0	0
5	KUP KRAJAN	0	0	0	0	0	0	0
6	SAWAHAN	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0

4. Kesehatan Penduduk

a. Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 16
Jumlah Kelahiran

No.	WILAYAH	JUMLAH KELAHIRAN				TOTAL	
		L	%	P	%	L + P	%
1	PAKIS	10	14,1%	30	13,0%	80	10,8%
2	PUTAT JAYA	188	48,8%	131	48%	201	45,1%
3	BAYU URIP	40	3,1%	39	15,4%	84	13,7%
4	PETEMON	22	0,2%	51	11,0%	73	12%
5	KUPANG KRAJAN	1	0,8%	34	17,7%	35	6,7%
6	SAWAHAN	24	7,4%	52	18%	76	12,4%
	JUNLAH	321	100%	233	100%	608	100%

b. Jumlah Kematian Bayi dan Balita

Jumlah kematian bayi dan balita di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 17
Jumlah Kematian Bayi

NO	WILAYAH	JUMLAH KEMATIAN BAYI	PENYERAS	JUMLAH KEMATIAN BALITA	PENYERAS	TOTAL
1	PAKIS	0	0	0	0	0
2	PUTAT JAYA	0	0	0	0	0
3	BAYU URIP	0	0	0	0	0
4	PETEMON	0	0	0	0	0
5	KUP KRAJAN	0	0	0	0	0
6	SAWAHAN	0	0	0	0	0
	JUNLAH	0	0	0	0	0

c. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian Ibu di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Jumlah Kematian Ibu

No.	WILAYAH	PENYEBAB KEMATIAN IBU			TOTAL
		HAMIL	BERSALIN	MIFAS	
1	PAKIS	0	0	0	0
2	PUTAT JAYA	0	0	0	0
3	BANJU URP	0	0	0	0
4	PETERONG	0	0	0	0
5	KIPARAJAN	0	0	0	0
6	SAWAHAN	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0

d. JUMAH Ibu Hamil

Jumlah Ibu hamil di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Jumlah Ibu Hamil

No.	WILAYAH	JUMLAH SUMIL			JAMINAN KESEHATAN		STATUS MELAKUKA	
		RR	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI	BPJS	TIDAK PUNYA BPJS	GAJIB	NON GAJIB
1	Banyu Uro	0	0	62	62	0	0	62
2	Kut Kharaji	0	0	28	28	0	0	28
3	Pakis	0	0	19	19	0	0	19
4	Peterong	0	0	64	64	0	0	64
5	Putat Jaya	0	0	125	125	0	0	125
6	Sawahan	0	0	48	48	0	0	48
	JUMLAH	0	0	324	324	0	0	324

e. Jumlah Catn

Jumlah Catn di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 20
Jumlah Catn

No.	WILAYAH	JUMLAH CATN				TOTAL	
		L	%	P	%	L + P	%
1	Banyu Urip	21	47,7%	23	52,2%	44	21,0%
2	Pakis	18	20,0%	19	20,4%	37	23,6%
3	Pudat Jaya	15	48,8%	25	51,2%	40	15,2%
4	Potomoni	10	42,8%	20	57,1%	30	13,7%
5	Kupang Kriyan	12	44,4%	16	55,6%	28	17,7%
6	Sawahon	8	60%	4	40%	12	4,3%
	JUMLAH	82	100%	111	100%	203	100%

f. Jumlah Akeceptor KB

Jumlah Peserta Akeceptor KB di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Jumlah Akeceptor KB

No.	WILAYAH	JUMLAH PESERTA KB				TOTAL	
		L	%	P	%	L + P	%
1	Banyu Urip	0	0%	92	100%	92	20%
2	Pakis	0	0%	143	100%	143	31,3%
3	Pudat Jaya	0	0%	0	0%	0	0%
4	Potomoni	0	0%	66	100%	66	14,3%
5	Kupang Kriyan	0	0%	90	100%	90	10,0%
6	Sawahon	0	0%	33	100%	33	14,3%
	JUMLAH	0	0%	468	100%	468	100%

g. Jumlah Peserta KB

Jumlah Peserta KB di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Jumlah Peserta KB

No.	WILAYAH	JUMLAH PESERTA KB				TOTAL	
		L	N	P	N	L+P	N
1	Banyu Urip	42	16%	1530	17,3%	1572	17,3%
2	Peka	66	24%	1811	20,0%	1877	21%
3	Pudat Jaya	54	19,3%	2366	26,9%	2420	26,7%
4	Pedarsan	33	11,8%	1158	13,1%	1191	13,1%
5	Kupang Kradan	28	10,1%	568	6,4%	596	6,6%
6	Sawahan	27	9,9%	642	7,3%	669	7,5%
Jumlah		270	100%	8765	100%	9035	100%

h. Jumlah Bayi dan Balita Stunting

Jumlah Bayi dan Balita Stunting di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Jumlah Bayi dan Balita Stunting

No.	WILAYAH	JUMLAH BAYI STUNTING			JUMLAH BALITA STUNTING		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	Banyu Urip	0	0	0	1	1	2
2	Peka	0	0	0	2	0	2
3	Pudat Jaya	0	0	0	2	1	3
4	Pedarsan	0	0	0	1	0	1
5	Kupang Kradan	0	0	0	1	1	2
6	Sawahan	0	0	0	3	1	4
Jumlah		0	0	0	10	4	14

1. Jumlah Bayi dan Balita Karang GiziKurus

Jumlah Bayi dan Balita Kutang GusiKurus di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tablet 24

Jumlah Bayi dan Balita Kurang Gizi/Kurua

[illegible][illegible]

j. Jumlah Anak Disabilitas

Jumlah anak disabilitas di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 25
Jumlah Anak Disabilitas

NO	WILAYAH	JUMLAH ANAK DISABILITAS			WONDERFAIR AKSES PELAYANAN KEMAHALAN			ISAK WONDERFAIR AKSES PELAYANAN KEMAHALAN		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	PAKIS	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2	PUTAT JAYA	5	6	11	5	6	11	0	0	0
3	BANYU UREP	0	3	3	0	3	3	0	0	0
4	PETEMON	7	4	11	7	4	11	0	0	0
5	KUP KRAJAN	10	5	15	10	5	15	0	0	0
6	SAWAHAN	5	1	6	5	1	6	0	0	0
	JUMLAH	24	20	44	24	20	44	0	0	0

k. Jumlah Perokok

Jumlah Perokok di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 26
Jumlah Perokok

No.	WILAYAH	JUMLAH PEROKOK				TOTAL	
		L	M	P	M	L+P	M
1	PAKIS						
2	PUTAT JAYA						
3	BANYU UREP						
4	PETEMON						
5	KUP KRAJAN						
6	SAWAHAN						
	JUMLAH						

[illegible]

b. Data Pengawasan Berbasis Hak Anak (Anak disasuh Saudara/Nenek/Lainnya)

Data Pengawasan Berbasis Hak Anak (Anak disasuh Saudara/Nenek/Lainnya) Kecamatan Sewahan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 29

Data Pengawasan Berbasis Hak Anak (Anak Disasuh Saudara/Nenek/Lainnya)

KELOMPOK	USIA 0-11H			USIA 1-11H			USIA 5-12 H			USIA 13-17H			TOTAL		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
PARIS															
PUTAT JAYA															
BANYU URP															
PETEMON															
KUP KRAJAN															
SAWAHAN															
JUMLAH															

7. Data Aset Kecamatan

Data aset Kecamatan yang digunakan untuk Masyarakat termasuk kegiatan pertemuan dan Anak di Kecamatan Sewahan, Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 30

Data Aset Kecamatan

NO	KECAMATAN	JENIS ASET/BARANG/LAINYA	KETERANGAN
1	PARIS	Ruang Pertemuan Kantor Kel Sound Sistem (Jk-Acoustic) Kursi Rapai Projektor + Layar	
2	BANYU URIP	Ruang Pertemuan Kantor Kel Sound Sistem (Jk-Acoustic) Kursi Rapai Projektor + Layar	
3	PUTAT JAYA	Ruang Pertemuan Kantor Kel Sound Sistem (Jk-Acoustic) Kursi Rapai Projektor + Layar	

4	PETEMON	Ruang Pertemuan Kantor Kel Sound Sistem (JH-Acoustic) Kursi Rapat Projektor + Layar	
5	KUPANG KRAJAN	Ruang Pertemuan Kantor Kel Sound Sistem (JH-Acoustic) Kursi Rapat Projektor + Layar	
6	SAWAHAN	Ruang Pertemuan Kantor Kel Sound Sistem (JH-Acoustic) Kursi Rapat Projektor + Layar	

8. Data Kegiatan Responsif gender yang masuk laporan PPRG Tahun 2025:
Data kegiatan Responsif Gender di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 51

**Data Sub Kegiatan Responsif Gender Termasuk Pembangunan Sarpras &
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**

No	WILAYAH	KEGIATAN SEBUT AKA/PRG KECAMATAN	KEGIATAN DAKULANYA	SASARAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT KEGIATAN		
					L	P	TOTAL
1	PAKIS						
2	PURAT JAYA						
3	BANTU URIP						
4	PETEMON						
5	KUP KRAJAN						
6	SAWAHAN						
	JUMLAH						

9. Data Sumber Dana

Data sumber dana di Kecamatan Sowahan Kota Sumbawa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 32
Data Sumber Dana

No	PROGRAM	SASARAN	APBD	APBN	LAINYA	TOTAL	ARO
1	Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pencanaan rencana pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpakkan	Warga yang melanggar aturan sesuai dengan hukum/PERDA yang berlaku di Kota Sumbawa	✓			Rp. 3.928.800	✓
2	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Shogitas dengan kebijakan negara Republik Indonesia, serta Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	1. PKL, PKO, Anjak, Dapeng dan masyarakat serta objek yang melanggar aturan sesuai dengan hukum/pada yang berlaku 2. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap inovasi pengembangan di dan wilayah	✓			Rp. 148.262.000	✓

		biaya kelestarian dan ketertarikan umum					
1	Program Peningkatan Urutan Pemerintahan Umum Peningkatan konflik sosial sebagai ketentuan peraturan perundang- undangan	Masyarakat yang tidak yang malinggar aturan sesuai dengan hukum/pada yang berlaku di Kota Sumbawa	✓			Rp. 25.754.400	✓
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan "Pepitedi perpembongkar usaha ekonomi masyarakat"	Seluruh warga masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah di wilayah kecamatan sawahan terkait laporan pendataan USDM	✓			Rp. 5.438.800	✓
5	Peningkatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik "Pekadaban Urutan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan"	Seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah kecamatan sawahan yang masuk kepengurusan administrasi kependudukan	✓			Rp. 4.495.200	✓

6	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 'Peningkatan efisiensi pelaksanaan pelayanan satu instansi di wilayah Kecamatan Sawahan'	Salah satu warga kecamatan Sawahan, RT. RW. 1, PMK	✓			Rp. 218.037.600	✓
7	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 'pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha'	Berkas permohonan SKKK, IMB bangunan di Kecamatan Sawahan	✓			Rp. 5.331.732	✓
8	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 'Koordinasiner di perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait'	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sawahan hasil laporan pemantauan dan pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan ini	✓			Rp. 2.081.705	✓
9	Penyelenggaraan Pemerintahan	Unsur Masyarakat di					

	dan Pemasaran Publik "Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan perencanaan di Kecamatan"	Wilayah Kecamatan Gawoh Kudus Kali RT, RW, LPMK / PKK Karang taruna, Forum Anak dan Tokoh Masyarakat	✓			Rp. 10.616.184	✓
10	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik "Peningkatan Kordinasi dan Pembinaan (Bimas, Siklatas, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Kekayaan Masyarakat"	LPMK, RW, RT, dan Karang Taruna	✓			Rp. 21.842.414	✓
11	Pemberdayaan Lembaga Kamasyarakatan Tingkat Kecamatan "Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Kamasyarakatan"	Bola, RW di wilayah Kecamatan Gawoh	✓			Rp. 275.788.800	✓
	JUMLAH					Rp. 402.616.710	

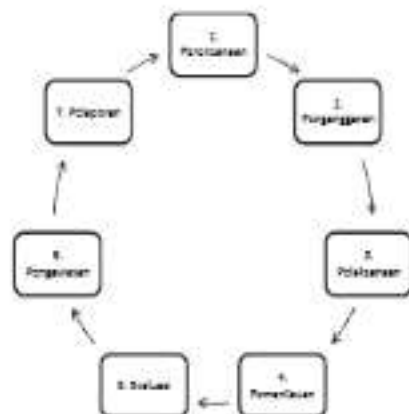
[illegible]

1.	Perencanaan Lembar	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
2.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
3.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
4.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
5.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
6.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
7.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
8.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
9.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)
10.	Perencanaan Pembacaan dan Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Form				laporan hasil Pembacaan (Lampiran yang dikumpulkan, 1 laporan)	Luas (Dikn, 100)

[illegible]

PENYELENGGAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN

Kecamatan Responsif Gender (KRG) Selayar Kelurahan Rantau Pemukiman dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut :



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam pemerolehan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut

beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memandang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Lembaran Negara RI tahun 1984 Nomor 29, tambahan Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Nomor 194 tambahan LNRI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convensi Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1949 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3036);

7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota UMR Tahun 2007, Nomor 82 UMR Nomor 4737
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Focal Point PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit kerja masing-masing SKPD
10. Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1950 dengan UU No.8 Tahun 1967 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan Perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
11. Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) dengan UU Nomor 60 Tahun 1998
12. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dengan UU. Nomor 7 Tahun1994
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2015 tentang sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Resmi Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 613)
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).
18. UU no 17 tahun 2007 tentang RPJN 2005-2025 dan Impres 5 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Rencana dan rencana Kecamatan untuk PUG

Buku Dokumentasinya

1. Dokumen Perencanaan Lima Tahunan (renstra)
2. Dokumen Perencanaan Tahunan (renja)

[illegible]

Table 1: Summary of the data set The table shows the distribution of the data set across different categories. The first column lists the categories, and the subsequent columns show the counts for each category.								
Category 1								
Category 2								
Category 3								
Category 4								
Category 5								
Category 6								
Category 7								
Category 8								
Category 9								
Category 10								

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang
Dilimpahkan
Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH:	Kecamatan Sawahan
PROGRAM	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada Camat
SUB-KEGIATAN	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

KINERJA RESPONSIF GENDER

• Output Aktivitas

- Jumlah laporan sejumlah 4 laporan (setiap Triwulan)
- Kegiatan patrol pemerintahan wilayah dilakukan setiap hari

Output indikator subkegiatan:

Jumlah laporan yang yang dikerjakan sebanyak 4 kali dalam satu tahun.

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA :

• Output kegiatan

- Terjalinnya keterbacaan dan keterlibatan di masyarakat wilayah Kecamatan Sawahan

• Outcome program :

- Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan DPD terkait desa/ tak ada masyarakat

• Impact :

Meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan di masyarakat wilayah Kecamatan Sawahan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Walikota Surabaya No. 45 Tahun 2021 tentang pemilihan beberapa urusan otonomi daerah kepada Kecamatan
- b. Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang kebutuhan, Struktur Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

SAMARAKAN UMUM

Jumlah Penduduk Kecamatan Sawahan

L: 98464

P: 101.084

Kecamatan Sawahan merupakan salah satu kecamatan besar di Kota Surabaya, sehingga diperlukan penanganan yang lebih intensif, dan memperhatikan beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan sebagai berikut

ISU GENDER

Faktor Kesenjangan Akses :

Adanya kesetiaan akses dalam mendapatkan informasi terkait pemahaman tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintahan Daerah ketika terjadi permasalahan yang ada di Kecamatan Sawahan, meliputi PKL, Kependudukan, Perencanaan, kesehatan, ekonomi, budaya Komunikasi, pelayanan umum, jalan, dan lainnya yang terjadi di kota Surabaya

Partisipasi :

Warga di wilayah kecamatan Sawahan sangat kooperatif dan mendukung program pemerintah Kota Surabaya dengan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum

Kelembagaan :

Warga / RT/RW memiliki kewenangan untuk melakukan pemrosesannya

Manfaat:

Peningkatan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sawahan

Beban Kesenjangan Internal :

- Ketersediaan masalah yang ada di masyarakat
- Minatnya pemerintah dalam menangani permasalahan
- Sarana dan prasarana yang ada kurang menunjang

Beban Kesenjangan Eksternal :

- Ketidakpuasan warga terhadap pemerintahan yang berlaku
- Maraknya pengurusan perijinan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama

B. PENERIMA MANFAAT

warga masyarakat Kecamatan Sawahan

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Tertujuan untuk Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lokal yang dilaksanakan

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIVITAS

- Melakukan pengumpulan data permasalahan terkait pemerintahan sebagai kewenangan, kemudian meneruskan kepada OPD terkait untuk ditindak lanjut
- Melakukan audit dan pemantauan wilayah

2. METODE PELAKSANAAN

- Meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan di masyarakat wilayah Kecamatan Sawahan
- Melakukan patroli dan pemantauan wilayah
- Koordinasi dengan OPD terkait (Dinas Perencanaan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

3. JADWAL

Dilaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2025 setiap hari

D. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Rp. 5.825.800,- (Anggaran Sub kegiatan tahun 2025)

Section A: Introduction to the International Labour Office

and together with the International Labour Office, the International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.

Section A	Section B	Section C	Section D	Section E	Section F	Section G	Section H	Section I
1. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	2. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	3. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	4. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	5. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	6. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	7. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	8. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.	9. The International Labour Office is the only body in the world that is not a member of the United Nations.

[illegible]

1

[illegible]

Abstract

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Notes**
 10. **Tables**
 11. **Figures**
 12. **Supplementary Materials**
 13. **Author Contributions**
 14. **Funding**
 15. **Conflict of Interest**
 16. **Publisher's Note**
 17. **Copyright**
 18. **Disclaimer**
 19. **References**
 20. **Appendix**
 21. **Notes**
 22. **Tables**
 23. **Figures**
 24. **Supplementary Materials**
 25. **Author Contributions**
 26. **Funding**
 27. **Conflict of Interest**
 28. **Publisher's Note**
 29. **Copyright**
 30. **Disclaimer**

[illegible]

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	Kacamatan Sawahan
PROGRAM	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kacamatan
SUB KEGIATAN	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

KINERJA RESPONSIF GENDER

- **Output Aktivitas**
 - Pelaksanaan Musrenbang Tahun Anggaran 2026 yang di adakan secara rutin dengan jumlah peserta : 1 (satu) Babas seluruhnya
 - Tersedianya pembangunan yang menjadi prioritas di masing - masing kecamatan
- **Output indikator subkegiatan:**
 - Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

- **Output kegiatan**
 - Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kacamatan Terselenggaranya Rinkes pelatihan digital marketing
- **Outcome program :**
 - Terselenggaranya pembangunan yang prioritas serta tepat sasaran
 - Tersedianya pembangunan yang menjadi prioritas di masing - masing kecamatan

Impact :

- Meningkatkan Persentase urusan musrenbang kecamatan yang dapat dilaksanakan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Perda NO 4 Tahun 2016 Tentang PUG
- b. Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUG Kota Surabaya
- c. Peraturan Daerah Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Swasta Dan Pemasangan Kolaborasi Dan Pembiayaan Masyarakat Kelurahan

2. GAMBARAN UMUM

Luas wilayah Kecamatan Sawahan : 8,32 km2
Dengan kepadatan penduduk 27.230 jiwa/km2
Jumlah penduduk kecamatan sawahan adalah : 108.305 jiwa
L : 98.445 jiwa
P:101.861 jiwa

Ketampek yang hadir dalam kegiatan Musrenbang adalah unsur Lembaga meliputi Bappedalitbang, Disbudparap, DSMBM, DLH, Disduk, DPRKPP, DKPP, Disdikotag, DPRD/Polsek, Karzoni, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, RW, LPMK, RW, Karang Taruna, Puskemas, Pelayari/Forum Anak, Dengan

Jumlah peserta yang ikut dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah 90 orang

L. 56

R. 34

Bahwa mulai tahun Anggaran 2024 dilaksanakan Pro Musrenbang

ISU GENDER

Faktor Keberhasilan Akses :

- Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait kegiatan musrenbang. Tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sub. Kegiatan ini

Partisipasi :

Peran serta laki-laki yang ikut dalam kegiatan musrenbang lebih banyak dibanding perempuan

Kontrol :

Dalam hal ini kontrol dilakukan bersama oleh ketua RT/RW/LPMK Lurah dan Camat serta pihak terkait pelaksanaan musrenbang

Manfaat:

Masyarakat yang hadir dapat menyampaikan usulannya sesuai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan

Bebat Keberhasilan Internal :

- Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan musrenbang sehingga ada beberapa pihak tidak bisa hadir
- Belum optimalnya sumber daya manusia di kecamatan sehingga karena terdapat SDM yang kurang optimal
- Adanya Usulan masyarakat belum tentu dapat diakomodir oleh Dinas terkait

Bebat Keberhasilan Eksternal :

- Luas wilayah kecamatan yang meliputi 8 kelurahan dengan jumlah penduduk yang cukup padat
- Adanya peserta musrenbang yang tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang lebih prioritas
- Pasivitas akan usulan pembangunan tidak terakomodir oleh dinas terkait

B. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat yang hadir dapat menyampaikan usulannya sesuai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Jumlah laporan terkait usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan Sawahan

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIVITAS

- Meningkatkan peran kelurahan untuk mengajukan pembangunan prioritas
- Melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk menjadwalkan kegiatan pra musrenbang

- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk Penetapan pelaksanaan monitoring tingkat kecomotan

2. METODE PELAKSANAAN

- Memastikan pemahaman kepada pihak terkait tentang pentingnya prioritas
- Melakukan koordinasi dengan Kelurahan
- Koordinasi dengan OPD terkait

3. JADWAL

Ditaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2023

2. BIAYA YANG DI PERLUKAN

(Rp 2.581.795 – Anggaran Sub kegiatan tahun 2023)

TRUCKER VIVIAN DUNE 1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723

[illegible]

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

RENCANA ACUAN KEMALUHAN OF REFERENCE

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perempuan Non Usaha TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: Kecamatan Sawahan
PROGRAM	: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perempuan Non Usaha

KINERJA RESPONSIF GENDER:

- **Output Aktivitas**
 - Target pendataan bergurur pada tahun 2025 sebanyak 400 rumah
 - Melakukan sosialisasi terkait PBD dan KRK di Tingkat Kelurahan 3 Bulat sekali
- **Output indikator subkegiatan:**
 - Jumlah pengurusan PBD dan KRK pada tahun 2024 di Kecamatan Sawahan sebanyak : 450

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA :

- **Output kegiatan :**
 - Meningkatnya Pemohonan perizinan non usaha (PBD dan KRK)
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan perizinan non usaha (PBD dan KRK)
- **Outcome program :**
 - Tersesakainya usaha yang masuk pemohonan perizinan non usaha (PBD dan KRK)

Impact :

Peningkatan jasa pelayanan yang cepat baik oleh masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Perda NO 4 Tahun 2019 Tentang PUG
- b. Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUG Kota Surabaya
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Urusan Daerah Diarah Kepada Kecamatan

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Urusan Daerah Diarah Kepada Kecamatan

Memprioritaskan Pembiayaan PBD dan KKK rumah tinggal maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m² dan memprioritaskan Arsitek lokal, Arsitek Keluar Masi (IKRIT)

Memprioritaskan PBD yang diajukan oleh warga melalui komite di lingkungan dan kecamatan Kecamatan bertanggung jawab pada proses pembiayaan berbasis PBD dan KKK.

Jumlah pensi di Kecamatan Sewahan yang sudah melakukan pengurusan PBD : 400 pensi

Jumlah warga yang melakukan pengurusan PBD dan KKK

L : 366

P : 123

ISU GENDER

Faktor Kesenjangan Akses :

- Warga bisa secara langsung datang ke kantor Kecamatan / Kelurahan untuk pengurusan PBD, Artinya kesenjangan akses dalam mendapatkan informasi terkait pentingnya pengurusan PBD dan KKK
- Tidak ada kesenjangan antara laki laki dan perempuan dalam info. Kegiatan ini

Partisipasi :

Seluruh semua pemilik pensi atau pengurus PBD dan KKK

Kontrol :

Masih butuh optimanya pemerintahan pemilik pensi untuk mengurus PBD dan KKK

Manfaat

Dengan memiliki PBD dan KKK maka terpenuhi legalitas bangunan/pensi tersebut

Sebab Kesenjangan Internal :

- Penyalahsatan lahan pada kecamatan belum optimal (sasaran/target terlewat hingga dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada)
- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya PBD dan KKK kepada masyarakat
-

Sebab Kesenjangan Eksternal

- Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengurusan PBD dan KKK
- Status Tanah yang masih jogerom
- Dalam proses pengurusan pengurusan PBD, masyarakat masih belum dapat memenuhi kewajiban persyaratan

B. PENERIMA MANFAAT

Warga masyarakat Kecamatan Sewahan

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

- Terselenggaranya berbagai yang masuk pembiayaan partisipan non usaha PBD dan KKK

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIFITAS

- Melakukan pendidikan / sukrela bangunan yang sudah memiliki status yang belum memiliki ijin PBD dan KKK
- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya memiliki PBD dan KKK

2. METODE PELAKSANAAN

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki PGG dan KKK
- Melakukan pendataan status bangunan

3. JADWAL

Dilaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2025

3. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Rp Rp. 3.331.752,- (Anggaran Sub kegiatan tahun 2025)

Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]	Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]	Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]	Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]	Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]	Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]	Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]	Informasi Umum Nama: [Nama] No. [No.] [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Alamat [Alamat] [Kota, Provinsi, Kode Pos] Informasi Kontak No. [No.] [Kota, Provinsi, Kode Pos]
--	--	--	--	--	--	--	--

									Weight Calculated Number of Weights Weight per Weight Number of Weights Weight per Weight
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA-TERM OF REFERENCE

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Daerah
Yang Ada Di Kecamatan
Sub Kegiatan : Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	Kecamatan Sirehan
PROGRAM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penetapan Rasio Daerah
SUB KEGIATAN	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KINERJA RESPONSIF GENDER

- **Output Aktivitas**
 - Pada tahun 2026 kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional jumlah peserta akan di kegiatan sebanyak 100 orang
- **Output indikator subkegiatan:**
 - Jumlah orang untuk Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

- **Output kegiatan**
 - Jumlah unit lembaga yang hadir dalam kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 -
- **Outcome program :**
 - Tercapainya target orang yaitu jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Meningkatnya pemahaman para ketua RT/RW serta pengurus tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Impact :**
 - Peningkatan semangat pemahaman masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- b. Perda NO 4 Tahun 2019 Tentang PUD
- c. Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUG Kota Surabaya

2. GAMBARAN UMUM

Luas wilayah kecamatan sikehan : 6,00 km2
Dengan kepadatan penduduk 27.230 jiwa/km2

Jumlah penduduk kecamatan sawahan adalah : 108.300 jiwa
L 58.485 jiwa
P 130.891 jiwa

untuk masyarakat yang menjadi peserta pada kegiatan ini dipromosikan. Pengurus RT di kelurahan Kecamatan Sawahan

ISU GENDER

Faktor Keterjangkauan Akses :

- Ketersediaan akses dan bentuk mendapatkan fasilitas kepada seluruh peserta dalam kegiatan ini dalam hal ini adalah ketua RT

Partisipasi :

Ketua RT kecamatan sawahan sangat kooperatif dan mendukung kegiatan ini

Kontrol :

Yang memiliki kontrol dalam pelaksanaan sosialisasi Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ditominasi oleh ketua RT

Manfaat:

Peserta yang hadir akan memahami tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Beban Keterjangkauan Internal :

- Minimnya anggaran sehingga kegiatan ini tidak bisa mengkonsumsi jumlah peserta yang maksimal
- Sarana & prasarana yang belum mendukung kegiatan ini (tempat sosialisasi)

Beban Keterjangkauan Eksternal :

- Adanya anggapan warga bahwa kegiatan semacam ini tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari
- Adanya peserta undangan yang tidak bisa hadir karena terbentur dengan kegiatan lain

B. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat yang hadir sebagai peserta sosialisasi Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

menguatkan pemahaman masyarakat (Pengurus RT) terhadap Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIVITAS

- Melakukan koordinasi dengan seluruh untuk mempersiapkan kegiatan ini untuk mengundang Pengurus RT sebagai peserta sosialisasi
- Melakukan sosialisasi kepada Pengurus RT akan pentingnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2. METODE PELAKSANAAN

- Memberikan pemahaman kepada warga akan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Melakukan koordinasi dengan Kelurahan

3. JADWAL

Ditaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2023

4. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Rp 21.842.414,- (Anggaran Sub kegiatan tahun 2023)

Journal of Management Education 36(10)
© 2012 Sage Publications
10.1177/0022032112468111

Kata Kunci: Perilaku konsumen, komunikasi pemasaran, persepsi merek, sikap merek, keputusan pembelian

[illegible]

[illegible]

	Strategic Goals 1. Increase revenue by 10% in Q4 2. Launch new product line by Q3 3. Expand market share in the Midwest region							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERAMOKA AQUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

Sub kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpertanian

PERANGKAT DAERAH	Kecamatan Sawahan
PROGRAM	Penhylenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang melibatkan kepala camat
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonpertanian

KINERJA RESPONSI GENDER

• Output Activities

- Jumlah masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi kependudukan pada tahun 2025 diperkirakan sekitar : 12.000 kepengurusan

• Output indikator subkegiatan:

- Jumlah orang yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan pada Tahun 2024
jumlah 11.972

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA :

• Output kegiatan

- Jumlah laporan untuk kegiatan administrasi kependudukan sebanyak 1 laporan selama setahun

• Outcome program :

- Tercapainya data terpadu untuk laporan kepengurusan administrasi kependudukan

Impact :

- Peningkatan Kapasitas Pemngkatan efisiensi pelayanan pada masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- b. Perda NO 4 Tahun 2019 Tentang PUG
- c. Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUG Kota Surabaya

2. GAMBARAN UMUM

Ruang lingkup pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif kependudukan yang diatur dalam peraturan-undangan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembinaan dan pengawasan jawa
Jumlah Penduduk Kecamatan Sawahan 199.330

L: 98.445

P: 190.891

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi pelaksanaan

1. **pelanggan;** pengalihan informasi; pengawasan internet; penyediaan kepada masyarakat dan
2. **pelanggan** konsultasi

ISU BENDER

Faktor Keselamatan Akses :

Adanya kesediaan akses dalam mendapatkan informasi terkait pemerintahan dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya

Partisipasi :

Partisipasi masyarakat tingkat tinggi sekali dalam kepemimpinan terikat data keselamatan baik melalui keselamatan maupun menguraikan secara mandiri (online)

Kontrol :

Yang memiliki kontrol dalam pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik adalah Camat melalui kepada seluruh Pemerintahan

Manfaat:

Administrasi data kependudukan masyarakat di wilayah kecamatan semakin menjadi lebih

Sebagai Kesenjangan Internal :

- Kurangnya sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat digunakan
- Kurangnya GDM sebagai dalam pemerintahan pegawai yang belum optimal

Sebagai Kesenjangan Eksternal :

- Minimnya anggaran untuk menunjang kegiatan administrasi kependudukan
- Proses kepemimpinan yang kurang efektif karena terbelah-belah

B. PENERIMA MANFAAT

Warga Masyarakat yang melakukan kepemimpinan kependudukan

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Terwujudkannya keadilan pada pelayanan kepada masyarakat melalui administrasi kependudukan dan lain sebagainya

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIFITAS

- Meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan inovatif
- Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan kecamatan
- Meningkatkan kepuasan masyarakat pada pelayanan kecamatan

2. METODE PELAKSANAAN

- Memberikan pemahaman kepada warga akan pentingnya mempunyai data kependudukan
- Melakukan koordinasi dengan Kelurahan dan Dinas Kependudukan

3. JADWAL

Ditaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2023

2. BIAYA YANG DI PERLUKAN

. Rp 4.455.585,- (Anggaran Subsidi kegiatan tahun 2020)

Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt. Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt.	Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt. Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt.	Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt. Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt.						Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt. Einzelne Aufgaben Einzelne Aufgaben sind die Aufgaben, die ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ausführt.
---	---	---	--	--	--	--	--	---

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERAMPAK ACUAN PERJALAN TERM OF REFERENCE

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sawahan

PERANGKAT DAERAH	Kecamatan Sawahan
PROGRAM	Penyediaan dan Pemeliharaan dan Pelayanan Publik
KESKUTAN	Penyediaan dan Pemeliharaan dan Pelayanan Yang Tidak Disesuaikan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
SUB KEGIATAN	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sawahan

KINERJA RESPONSIF GENDER

- **Output Aktivitas**
 - Pada tahun 2023 akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat 1 bulan sekali terkait administrasi kependudukan
 - Melakukan evaluasi rutin setiap hari
- **Output indikator subkegiatan:**
 - Jumlah laporan untuk kegiatan administrasi kependudukan sebanyak 12 laporan selama setahun

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA :

- **Output kegiatan**
 - Ketersediaan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik
- **Outcome program :**
 - Tercapainya Pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
 - Tercapainya program pemerintah sesuai dengan penunjang-undangan

Impact :

- Peningkatan Ketersediaan Peningkatan efektifitas pelayanan pada masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- b. Perda NO 4 Tahun 2019 Tentang PUG
- c. Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUG Kota Surabaya

2. GAMBARAN UMUM

Ruang lingkup pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi : pelayanan jasa publik serta pelayanan administrasi kependudukan yang diatur dalam peraturan-peraturan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembinaan dan penunjang-penunjang.

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi pelaksanaan

1. **pelayanan**, pengumpulan informasi, pengumpulan informasi, penyediaan kepada masyarakat dan

2. **pelayanan** konsultasi

ISU GENDER

Faktor Keterbatasan Akses :

Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait pemahaman dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Partisipasi :

Partisipasi masyarakat sangat tinggi sekali dalam keputusan terkait data kependudukan baik melalui kecamatan maupun langsung secara mandiri (online).

Kontrol :

Terdapat kontrol dalam pengontrolan keputusannya/keputusan terkait dengan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik adalah Camat melalui kepala seksi Pemerintahan.

Manfaat:

Administrasi data kependudukan masyarakat di wilayah kecamatan semakin menjadi lebih

Bebas Keterbatasan Internal :

- Kurangnya SDM petugas dalam menunjang atau melaksanakan tugas pelayanan publik
- Sarana dan Prasarana kurang memadai

Bebas Keterbatasan Eksternal :

- Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya administrasi kependudukan
- Warga masyarakat masih banyak yang belum bisa melakukan kepengurusan mandiri secara online
- Banyaknya warga yang belum memahami proses kepengurusan pendudukan memerlukan cukup waktu sesuai SOP

B. PENERIMA MANFAAT

Warga Masyarakat yang melakukan Kepengurusan Kependudukan

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan meningkat dan lebih cepat

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIFITAS

- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Masyarakat tentang administrasi kepengurusan data kependudukan melalui aplikasi
- Melakukan evaluasi terkait dengan kekurangan dalam pelayanan
- Menandatangani pakta integritas

2. METODE PELAKSANAAN

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 1 bulan sekali terkait administrasi kependudukan
- Melakukan evaluasi rutin setiap hari

3. JADWAL

Ditaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2020

4. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Rp 218.037.000,- (Anggaran S.D.B kegiatan tahun 2020)

Gender: ☐ Male ☐ Female

1997年12月1日

Das regierte: Perungudi Periyavalu Muniswami, Dattarajam, Nallur, Kallakudi Perumanna, Perampalapuram & Kelambayam, Tenali, Jallu

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

Sub kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH	Kecamatan Sawahan
PROGRAM	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
SUB KEGIATAN	Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

KINERJA RESPONSIF GENDER

• Output Aktivitas

- Pelaksanaan Musbangkel Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan pada tahun 2025 akan diadakan di tiap-tiap Kelurahan masing-masing 2 kali dalam 1 tahun

• Output indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Isu/Isi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di masing-masing Kelurahan

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

• Output kegiatan

- Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musbangkel pada tingkat Kelurahan

• Outcome program :

- Terwujudnya output masyarakat terkait pembangunan serta prosesnya di kelurahan dan Pemerintahan Masyarakat Kelurahan
- Terwujudnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakatan

Impact :

- Persentase lautan musbangkel yang menjadi pembangunan prioritas

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Penda NO 4 Tahun 2019 Tentang PUG
- b. Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUO Kota Surabaya
- c. Permen Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Secara Dari Masyarakat Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

2. GAMBARAN UMUM

- Luas wilayah kecamatan sawahan : 8,55 km²
- Densitas kepadatan penduduk 27.230 jiwa/km²
- Jumlah kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Sawahan sebanyak 6 kelurahan
- Jumlah penduduk kel kecamatan sawahan adalah : 100.335 jiwa

L. 08.445 Jwa

P. 100.891 Jwa

Kegiatan musbangkel diadakan di masing-masing kelurahan 1 tahun 2 kali

Kelompok yang hadir dalam kegiatan musbangkel adalah: Ketua RT, RW, LPMK, PKK, masing-masing

Forum Anak dan Tokoh Masyarakat

Jumlah peserta yang ikut dalam penyelenggaraan Musbangkel Kecamatan adalah 170 orang di setiap kelurahan

L. 110

P. 80

ISU GENDER

Faktor Keberhasilan Akses :

- Adanya Adanya kesadaran warga dalam mendapatkan informasi terkait perencanaan pembangunan

Partisipasi :

Pelaku serta lembaga yang mengikuti kegiatan ini di dominasi laki-laki dibanding perempuan

Kontrol :

Yang memiliki kontrol dalam pelaksanaan musbangkel adalah masih di dominasi oleh Peserta Laki-laki

Manfaat:

Peserta musbangkel yang hadir bisa mengemukakan pembangunan prioritas di wilayahnya

Beban Keberhasilan Internal :

- Kurangnya sarana prasarana yang belum mendukung
- Adanya Usulan Masyarakat belum tentu dapat diakomodir oleh Dinas terkait

Beban Keberhasilan Eksternal :

- Luas wilayah Kecamatan yang meliputi 6 kelurahan dengan jumlah penduduk yang cukup padat
- Adanya peserta musbangkel yang tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang lebih prioritas
- Pesimis akan usulan pembangunan bisa terakomodir oleh dinas terkait

E. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat yang tidak dapat menyampaikan usulnya sebagai prioritas pembangunan yang telah diwujudkan

D. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Peningkatan partisipasi jumlah lembaga terkait pelaksanaan Masyarakat. Pembangunan Kelurahan

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIVITAS

- Membuat koordinasi dengan kelurahan untuk menjadwalkan kegiatan ini musbangkel

- Melaksanakan kegiatan musabakat yaitu : merumuskan usulan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan usulan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

2. METODE PELAKSANAAN

- Memastikan pemahaman kepada pihak terkait tentang perencanaan pembangunan prioritas
- Melakukan koordinasi dengan Rakas RT/RW/LPMK
- Koordinasi dengan OPD terkait

3. JADWAL :

Ditaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2023

2. BIAYA YANG DI PERLUKAN

:- Rp 18.875.184,- (Anggaran Sub kegiatan tahun 2023)

1. Introduction 2. Background 3. Methodology 4. Results 5. Discussion 6. Conclusion 7. References 8. Appendix 9. Index 10. Table of Contents 11. Abstract 12. Summary 13. Key Words 14. Keywords 15. Subject 16. Topic 17. Field 18. Area 19. Discipline 20. Department 21. Faculty 22. School 23. College 24. University 25. Institution 26. Organization 27. Company 28. Enterprise 29. Business 30. Industry 31. Market 32. Segment 33. Niche 34. Category 35. Class 36. Group 37. Team 38. Unit 39. Division 40. Section 41. Department 42. Faculty 43. School 44. College 45. University 46. Institution 47. Organization 48. Company 49. Enterprise 50. Business 51. Industry 52. Market 53. Segment 54. Niche 55. Category 56. Class 57. Group 58. Team 59. Unit 60. Division 61. Section 62. Department 63. Faculty 64. School 65. College 66. University 67. Institution 68. Organization 69. Company 70. Enterprise 71. Business 72. Industry 73. Market 74. Segment 75. Niche 76. Category 77. Class 78. Group 79. Team 80. Unit 81. Division 82. Section 83. Department 84. Faculty 85. School 86. College 87. University 88. Institution 89. Organization 90. Company 91. Enterprise 92. Business 93. Industry 94. Market 95. Segment 96. Niche 97. Category 98. Class 99. Group 100. Team 101. Unit 102. Division 103. Section 104. Department 105. Faculty 106. School 107. College 108. University 109. Institution 110. Organization 111. Company 112. Enterprise 113. Business 114. Industry 115. Market 116. Segment 117. Niche 118. Category 119. Class 120. Group 121. Team 122. Unit 123. Division 124. Section 125. Department 126. Faculty 127. School 128. College 129. University 130. Institution 131. Organization 132. Company 133. Enterprise 134. Business 135. Industry 136. Market 137. Segment 138. Niche 139. Category 140. Class 141. Group 142. Team 143. Unit 144. Division 145. Section 146. Department 147. Faculty 148. School 149. College 150. University 151. Institution 152. Organization 153. Company 154. Enterprise 155. Business 156. Industry 157. Market 158. Segment 159. Niche 160. Category 161. Class 162. Group 163. Team 164. Unit 165. Division 166. Section 167. Department 168. Faculty 169. School 170. College 171. University 172. Institution 173. Organization 174. Company 175. Enterprise 176. Business 177. Industry 178. Market 179. Segment 180. Niche 181. Category 182. Class 183. Group 184. Team 185. Unit 186. Division 187. Section 188. Department 189. Faculty 190. School 191. College 192. University 193. Institution 194. Organization 195. Company 196. Enterprise 197. Business 198. Industry 199. Market 200. Segment 201. Niche 202. Category 203. Class 204. Group 205. Team 206. Unit 207. Division 208. Section 209. Department 210. Faculty 211. School 212. College 213. University 214. Institution 215. Organization 216. Company 217. Enterprise 218. Business 219. Industry 220. Market 221. Segment 222. Niche 223. Category 224. Class 225. Group 226. Team 227. Unit 228. Division 229. Section 230. Department 231. Faculty 232. School 233. College 234. University 235. Institution 236. Organization 237. Company 238. Enterprise 239. Business 240. Industry 241. Market 242. Segment 243. Niche 244. Category 245. Class 246. Group 247. Team 248. Unit 249. Division 250. Section 251. Department 252. Faculty 253. School 254. College 255. University 256. Institution 257. Organization 258. Company 259. Enterprise 260. Business 261. Industry 262. <

**GENDER ACTION BUDGET (GAB)
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE**

Sub kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

PERANGKAT DAERAH	: Kecamatan Sawahan
PROGRAM	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
KEGIATAN	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

KINERJA RESPONSIF GENDER :

• **Output Aktivitas**

- Tersedianya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Jaringan Internet di Balai RW se Kecamatan Sawahan
- terwujudnya jaringan wifi yang ada di Balai RW sebagai sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

Output indikator subkegiatan:

Jumlah sarana dan prasarana berupa penyediaan jaringan wifi yang terpasang di Balai RW

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA :

• **Output kegiatan :**

- Jumlah Balai RW yang memanfaatkan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Jaringan Internet

• **Outcome program :**

- Tersedianya Jumlah jaringan wifi di Balai RW
- sangat membantu dan bermanfaat bagi warga

• **Impact :**

Terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana berupa jaringan wifi

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan sebagaimana urusan ekonomi daerah kota kecamatan
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kebudayaan, Sukan dan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
- c. Perwali Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ya

GAMBARAN UMUM

Ruang lingkup pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi: pelayanan jasa publik serta pelayanan administrasi kependudukan yang diatur dalam perundang-undangan untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik diberikan prima dan penanggung jawab

Jumlah Penduduk Kecamatan Sawahan 195.335

L: 06.445

P:100.881

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pelaksanaan

1. **pelayanan:** pengisian informasi, pengisian surat, penyuluhan kepada masyarakat, dan
2. **pelayanan konsultasi**

ISU GENDER

Faktor Keterjangkauan Akses :

Adanya kesulitan akses dalam mendapatkan informasi terkait Berita dan Prosedur pelayanan wifi di Balai RW

Partisipasi :

Partisipasi masyarakat sangat tinggi sekali untuk bisa mengakses jaringan internet melalui wifi yang ada di Balai RW banyak dimanfaatkan oleh Bu-Bu dan anak-anak

Kontrol :

Tidak memiliki kontrol dalam kegiatan ini di dominasi oleh Bu-Bu dan anak-anak

Manfaat:

Untuk mempermudah warga dalam mengakses jaringan wifi secara gratis

Sebab Keterjangkauan Internal

- Berani & proaktif yang belum mendukung kegiatan ini
- Masih terdapat pegawai yang kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya

Sebab Keterjangkauan Eksternal

- Kurangnya minat warga untuk menggunakan fasilitas ini karena sudah punya jaringan sendiri
- Minimnya anggaran untuk menunjang kegiatan ini

2. PENERIMA MANFAAT :

Warga masyarakat yang memanfaatkan fasilitas jaringan wifi

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan berupa penyediaan jaringan wifi di wilayah Kecamatan Sawahan

2. RENCANA AKSI:

1. AKTIFITAS

- Pengisian Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan di Kantor Bala RW sa Kecamatan Sawahan
- Koordinasi dengan PT. Telkom sebagai Penyedia untuk perawatan dan kelancaran Jaringan Wifi

2. METODE PELAKSANAAN

- Memberikan pemahaman kepada warga masyarakat untuk mempergunakan jaringan wifi dengan baik
- Melakukan koordinasi dengan PT. Telkom

3. JADWAL:

Dilaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2023

3. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Rp. 229.824.900,- (Anggaran 8 di kagatan tahun 2023)

Department of Psychology, University of
 California, Los Angeles, CA 90095-1553
 USA

Table 1 Summary of the study design and participant characteristics

[illegible]

1011 1012 1013 1014 1015

1016

1017 1018 1019 1020

1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030

1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

[illegible]

GENDER ACTION BUDGET (GAB)
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT- TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: Kecamatan Sawahan
PROGRAM	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kec
SUB KEGIATAN	: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

KINERJA RESPONSIF GENDER:

• **Output Aktivitas**

- Pendataan pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 300 orang
- Pada tahun 2025 akan dilaksanakan sosialisasi tentang pinjaman sistem berusaha sebanyak 3 kali dengan target jumlah peserta sebanyak 300.
- Koordinasi dengan PD tahun 2025 dengan rencana akan dilaksanakan ...

Output indikator subkegiatan:

- Jumlah UMKM yang mendapatkan izin pada tahun 2025 sebanyak 300 orang

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA :

• **Output kegiatan :**

Laporan yang dibuat 3 kali dalam setahun

• **Outcome program :**

Terselenggaranya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi (nirlaba) oleh masyarakat

• **Impact :**

- Meningkatkan persentase pertumbuhan produktivitas Usaha Mikro
- Menurunkan indeks kemiskinan (IKPD)

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Perda NO 4 Tahun 2014 Tentang PUG
- b. Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUG Kota Sandiways
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 TENTANG Cipta Kerja
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

GAMBARAN UMUM

UMKM adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha/bisnis yang dijalankan oleh individu/kelompok, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil yang memenuhi standar sebagai usaha mikro. Jadi, bisa disimpulkan bahwa UMKM ini sebagai sebuah bisnis yang dikelola oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, contoh UMKM mikro yang sering kita jumpa diantaranya adalah toko kelenteng, warung makan, usaha jahit, usaha penjualan target, usaha pembuat kue, katering dan lain-lain.

Jumlah Penduduk di Kecamatan Sawahan: 199.543 jiwa

Laki-Laki : 96.404

Pemempuan : 101.094

*Sumber data dari Dispenduk 2024

Jumlah UMKM yang ada di wilayah kecamatan Sawahan sesuai dengan pendataan ada 1406 UMKM

Laki-Laki : 502

Pemerempuan : 904

Jumlah UMKM yang Aktif 182 UMKM

Laki-Laki : 40

Pemerempuan : 142

*Sumber data dari Dinas Koperasi (2024)

ISU GENDER

Faktor Kesenjangan :

Akses :

adanya kemudahan akses bagi warga untuk segala proses kepemilikan perijinan, permodalan, dan fasilitas dengan OPD terkait di

Partisipasi :

- Rendahnya kondisi UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan

- Tingginya peran serta warga dalam mendukung/mendorong kegiatan UMKM dan kesejahteraan asal khususnya bagi pemerempuan

Kontrol :

yang memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan di dominasi oleh laki-laki, di era saat ini wanita/Pemerempuan bisa mengambil keputusan

Manfaat:

Pelaku usaha/UMKM dapat mendefektikan NIBnya secara langsung untuk legalisasi usaha dan terdaftar di Dinas terkait.

Sebab Kesenjangan Internal :

- Kurangnya personal/pelugas dalam pelaksanaan pekerjaan
- Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait
- Kurangnya sosialisasi dengan pelaku UMKM

Sebab Kesenjangan Eksternal :

- Kurangnya minat daya beli masyarakat pada produk UMKM
- Kurangnya informasi tentang pengurusan perijinan berusaha (NIB)
- Minimnya pemahaman pelaku UMKM dalam pengisian aplikasi sistem perijinan berusaha

B. PENERIMA MANFAAT

Seluruh warga masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah di wilayah kecamatan Sawahan terkait laporan pendataan UMKM

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Meningkatkan pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah yang valid di wilayah Kecamatan Sawahan yang respectif gender

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIVITAS :

- Melakukan pendataan/survey/wawancara terhadap pelaku usaha UMKM
- Melakukan sosialisasi tentang perijinan sistem berusaha

- Koordinasi dengan DPD terkait

2. METODE PELAKSANAAN

- Mengadakan pendataan/survey wawancara terhadap pelaku usaha UMKM (Swakelola)
- Mengadakan sosialisasi tentang perijinan sistem berusaha (Swakelola)
- Koordinasi dengan DPD terkait (Swakelola)

3. JADWAL :

Dilaksanakan Tiga (3) kali dalam setahun (April, Juli, November Tahun 2025)

3. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Rp 9.400.000,- (Anggaran Sub kegiatan tahun 2025)

[illegible]

Abstract Introduction Methods Results Discussion Conclusion References Keywords Introduction Methods Results Discussion Conclusion References	Introduction Methods Results Discussion Conclusion References Introduction Methods Results Discussion Conclusion References							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

	• Anteil Umsatz • Marktanteil • Umsatz Index • Marktanteilsindex • Mengen Index • Preis • Umsatzindex • Mengen • Umsatzindex • Umsatz Index								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - undangan Tahun 2025

PERINGKAT DAERAH:	Kacamatan Sawahan
PROGRAM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
KEBIDATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
SUB KEGIATAN	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - undangan

• Output Aktivitas

- Pada tahun 2025 akan meningkatkan peran serta 2 pilar
- Meningkatkan pemerintahan keamiran dan ketertiban
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam penanganan konflik

Output indikator subkegiatan:

Jumlah laporan konflik yang ditangani sebanyak 12 laporan

KENCAH CAPAIAN INDIKATOR KEMERUA :

• Output kegiatan

- Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12 laporan.

• Outcome program :

- Tercapainya ketertarikan dan ketertiban di masyarakat wilayah Kacamatan Sawahan

Impact :

Memperkuat pemerintahan dan ketertiban di masyarakat wilayah Kacamatan Sawahan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Walikota Surabaya No. 46 Tahun 2021 tentang pelaksanaan sebagai urusan eksekutif daerah kepada Kacamatan
- b. Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang kebijakan, Sistem Organisasi Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kacamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

SAMARAN UMUM

Konflik merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang tidak dapat dihindari. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, apalagi jika pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan upaya serius untuk menangani konflik tersebut. Jumlah konflik yang pernah terjadi di Kecamatan sawahan pada tahun 2024 sebanyak 144 kasus

Jenis Kasus yang pernah terjadi :

- Perkelahian antar anak
- Perantara nama baik
- Perundungan
- Penyerobotan lahan
- Perkelahian keluarga
- Kekerasan rumah tangga

Jumlah Penduduk Kecamatan Sawahan 155.548

L: 1944
P: 101.084

Jumlah RT: 54 Kecamatan Sawahan tahun 2024:
L: 482
P: 87

Jumlah RW: 73 Kecamatan Sawahan tahun 2024:
L: 68
P: 4

Jumlah pelapor konflik sosial di Kecamatan Sawahan pada tahun 2024:
L: 72
P: 12

Urut yang menangani konflik di Kecamatan Sawahan Setiap PP:
L: 21
P: 3
Polsuk:
L: 8
P: 0
Koramil:
L: 9
P: 0

ISU GENDER

Faktor Keterjangkauan Akses :

Warga mendapatkan akses untuk melaporkan permasalahan atau konflik ke Kecamatan melalui 3 jalur

Partisipasi :

Warga yang bermasalah dapat menyampaikan permasalahannya ke RT atau dapat langsung ke Kecamatan

Kontrol :

Warga / RT/RW memiliki kewenangan untuk melaporkan permasalahannya
Wurfasat

Meminimalisir terjadinya konflik antar warga di lingkungan sekitar khususnya di wilayah Kecamatan Sawahan

Sebab Keterjangkauan Internal

- Belum optimalnya pengkaderan dari aparat (Kecamatan, Polsuk, Koramil)
- Permasalahan yang timbul pada masyarakat sering tidak terdeteksi, karena merasa malu
- Sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung, antara lain : model patroli hanya 1 unit
- Luas wilayah dan kepadatan penduduk yang tidak sepadan dengan jumlah personel

Sebab Keterjangkauan Eksternal

- Ketidaksiapan warga terhadap aturan yang berlaku
- Keterjangkauan ekonomi rentan menimbulkan permasalahan
- Kurangnya kerjasama masyarakat dalam penanganan konflik yang terjadi
- Adanya intervensi pihak lain terkait konflik yang terjadi

B. PENERIMA MANFAAT

D. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. TUJUAN REFORMULASI

Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan Sawahan.

2. RENCANA AKSI :

1. AKTIVITAS

- Peneguhan peran serta tiga pilar (Polsik, Koramil, dan Pamkot) dalam penanganan konflik
- Pemertuaan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sawahan dengan melakukan patroli gabungan 3 pilar
- Koordinasi dan komunikasi penanganan konflik dengan RT dan RW
- Sosialisasi dan pembinaan masyarakat dalam penanganan konflik

2. METODE PELAKSANAAN

- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat wilayah Kecamatan Sawahan
- Melakukan patroli dan pemertuaan wilayah
- Koordinasi dengan OPD terkait (Kapolsek dan Koramil)

3. JADWAL :

Dilaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2021 selanjutnya

5. BIAYA YANG DI PERLUKAN

- Rp. 25.756.400,- (Kingsoran Gula kagiatan tahun 2021)

Global Analysis Partners, LLP
400 Lexington Avenue, Suite 2000
New York, NY 10017-4803
Tel: 212 512 2000
Fax: 212 512 2001
www.gapllp.com

Full-length cDNA clones encoding MyoD-like bHLH proteins were identified in a cDNA library of embryonic stem (ES) cells of 129/Ola mice. The expression of these genes was examined by Northern blot analysis. The expression of the bHLH genes was found to be tissue-specific and developmentally regulated. The expression of the bHLH genes was found to be tissue-specific and developmentally regulated. The expression of the bHLH genes was found to be tissue-specific and developmentally regulated.

[illegible]

[illegible]

1. Name des Projekts 2. Ziel 3. Umfang 4. Risiko 5. Kosten 6. Zeit 7. Qualität 8. Kommunikation 9. Dokumentation 10. Sonstiges									1. Name des Projekts 2. Ziel 3. Umfang 4. Risiko 5. Kosten 6. Zeit 7. Qualität 8. Kommunikation 9. Dokumentation 10. Sonstiges
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Partisipasi :

Warga di wilayah kecamatan Sawahan sangat kooperatif dan mendukung program pemerintah Kota Surabaya dengan ikut serta dalam penyelenggaraan keterampilan dan keahlian umum

Kontrol :

Warga / RT/RW memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan

Mandati :

PenamaWarga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sawahan

Sebab Kewenangan Internal :

- Kompetensi keahlian yang ada di masyarakat
- Minimnya personel dalam menangani permasalahan
- Sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung

Sebab Kewenangan Eksternal :

- Melaksanakan patuh warga terhadap peraturan daerah yang berlaku
- Momen pengumuman perjanjian membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama

B. PENERIMA MANFAAT :

warga masyarakat Kecamatan Sawahan

C. STRATEGI UNTUK MENDAPAI KINERJA :

1. TUJUAN REFORMULA II :

Terdapatnya Usulan Pemerintahan yang sesuai dengan Kewenangan Lain yang Ditambah

2. RENCANA AR-R :

1. AKTIFITAS :

- Melakukan pengumpulan data permasalahan terkait pelayanan sebagai kewenangan, kemudian menuliskan kepada OPD terkait untuk dapatnya di tindak lanjut
- Melakukan patrol dan pemantauan wilayah

2. METODE PELAKSANAAN :

- Meningkatkan keterbacaan dan keterbacaan di masyarakat wilayah Kecamatan Sawahan
- Melakukan patrol dan pemantauan wilayah
- Koordinasi dengan Kabupaten Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional Indonesia dan instansi terkait di wilayah Kecamatan Sawahan

3. JADWAL :

Dilaksanakan Pada Bulan Januari – Desember 2025 setiap hari

3. BIAYA YANG DIPERLUKAN :

Rp. 146.182.000,- (Anggaran Sub kegiatan tahun 2025)

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong keterlibatan, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penanaman anggaran khusus untuk perempuan.

- Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG

- a. Peraturan Pemerintah (Mendagri) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346).
- a. UU No 17 Tahun 2007 Tentang RPJN 2005-2025 dan Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG)
- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengeluaran Keuangan Daerah

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik "Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan "
2	Program Koordinasi Ketenbangan dan Keterbacaan Umum "Sinergis dengan kebijakan negara Republik Indonesia, serta Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan"
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum " Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan prosedur perundang-undangan"
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan "Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat"
5	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik "Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan"
6	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik "Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di wilayah kecamatan sawahan"
7	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik "pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha"
8	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik "Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait"
9	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik "peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan"
10	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik "Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bertuk, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional"
11	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan "Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat"

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Kecamatan Sawahan, Kota Sumbawa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pembiayaan Pemerintah dan Pelayanan Publik "Pelestarian unsur pemerintahan yang terkait dengan keberagaman dan yang dilestarikan"	Rp. 3.825.800
2	Program Koordinasi Ketahanan dan Ketertarikan Umum "Sinergitas dengan kebijakan negara Republik Indonesia, serta Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan"	Rp. 140.262.000
3	Program Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum + Peningkatan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"	Rp. 25.754.400
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan "Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat"	Rp. 9.438.800
5	Pembiayaan Pemerintah dan Pelayanan Publik "Pelestarian Unsur Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan"	Rp. 4.485.366
6	Pembiayaan pemerintah dan pelayanan publik "Peningkatan efisiensi pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di wilayah kecamatan sasaran"	Rp. 258.537.800
7	Pembiayaan Pemerintah dan Pelayanan Publik "pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha"	Rp. 5.331.732
8	Pembiayaan Pemerintah dan Pelayanan Publik "Koordinasi/strategi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait"	Rp. 2.981.706
9	Pembiayaan Pemerintah dan Pelayanan Publik "peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan"	Rp. 10.610.104
10	Pembiayaan Pemerintah dan Pelayanan Publik "Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Dinas, Swakelola, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional"	Rp. 21.842.414
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan "Peningkatan peran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan"	Rp. 275.788.000
	TOTAL ANGGARAN	Rp.402.616.716

3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Jurnis sebelumnya)

Kepitan yang dilaksanakan untuk pengarusutamaan gender pastinya memiliki pelaksanaan yang jelas. Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) merujuk kepada usaha untuk mengutangkan kesenjangan gender dan memastikan keadilan hak serta peluang di kalangan lelaki dan wanita. Melibatkan inisiatif dan langkah-langkah mencapai objektif seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Pelaksanaan PUG agar terorganisir dan terstruktur dengan baik maka perlunya pentadbiran dasar dan undang-undang mengenai keadilan pengarusutamaan gender, program-program pendidikan dan kesedaran untuk kesetaraan gender, pembangunan ekonomi inklusif yaitu memastikan bahwa wanita dan lelaki mempunyai akses yang sama mengenai peluang ekonomi seperti melibatkan wanita pada sektor-sektor ekonomi, penyerahan dalam politik yaitu keterlibatan wanita dalam pemilihan atau menjadi anggota dalam politik. Penghapusan diskriminasi dalam gender semua aspek kehidupan yaitu termasuk di tempat kerja, di rumah, dan dalam masyarakat umum.

1. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya)

Output yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yaitu seperti kandidat pada jabatan politik seperti anggota parlemen, kepala daerah, atau posisi politik lainnya. Memberikan hak pilih dalam pemungutan suara pemilihan, ikut berpartisipasi menjadi kepanitiaan di suatu organisasi seperti pengantar pemilu, kemas 17 an, dll. Berikut output pada Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan di Instansi Kecamatan :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan pada Camat
"pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan"

Sedangkan Output pada Bidang Ekonomi seperti memberikan kesempatan pekerjaan kepada wanita, termasuk sektor-sektor yang sebelumnya di dominasi oleh laki-laki. Pekerjaan seperti Pilot yang sebelumnya dominan laki-laki saat ini boleh perempuan. Pekerjaan lainnya yang seperti usaha mikro-kecil, menengah, yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, pelatihan dan keterampilan pada bidang industri dan lainnya. Berikut Output Bidang Ekonomi di Instansi Kecamatan :

1. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat tingkat kecamatan "fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat"

Bidang sosial yaitu hak-hak pemenuhan penghapusan stereotip gender, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Penghapusan diskriminasi seperti tempat kerja, inklusi pendidikan dan di masyarakat secara umum. Berikut Output Bidang Sosial di Instansi Kecamatan :

1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (pemerintah) "Tercapainya pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat"

Bidang Hukum yaitu memberikan sistem hukum untuk melindungi hak-hak perempuan termasuk perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan diskriminasi gender di tempat kerja, Partisipasi dalam pengambilan keputusan, memimpin pada suatu organisasi, dll. Berikut output bidang hukum di instansi kecamatan :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengugasan kepala daerah "Kegiatan patrol pemantauan yang di lakukan setiap hari"
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan pada Camat "Jumlah laporan sejumlah 4 laporan setiap thwulan, kegiatan patrol pemantauan wilayah dilakukan setiap hari"

Berikut output-output bidang lainnya di instansi kecamatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan Pada Camat "Tercapainya laporan terkait pemisahan peredaran non usaha (IMB dan SIGRIQ)" yang dimana pengurusan surat-surat ini bisa dilakukan oleh wanita.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan pada Camat "Jumlah laporan sejumlah 4 laporan setiap thwulan, kegiatan patrol pemantauan wilayah dilakukan setiap hari".
3. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan "Tercapainya target orang yaitu jumlah pengurus RT yang mengikuti kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional pada tahun 2025".

4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat "Tercapainya data terlaya untuk laporan kepengurusan administrasi kependudukan"
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan "Tercapainya pelaksanaan peningkatan kepada masyarakat"

2. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Layanan Pemberdayaan Perempuan yang menyediakan layanan komprehensif

1. Layanan Informasi : Kelompok Informasi Masyarakat Kecamatan Sawahan.
2. Layanan Koneksi : Pustaka lap bab RW di Kelurahan Se Kecamatan Sawahan.
3. Layanan Pelatihan : Pelatihan Kelompok Usaha Seperti Marjahit dan Bekan.
4. Layanan Jejaring Rajukan : CCCM (Crisis Center Cahaya Mentari) untuk kasus perempuan dan anak di Kecamatan Sawahan.
5. Presentase Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki program Komprehensif.
 - a. Program Sosialisasi/Promosi : Sosialisasi kekerasan pada rumah tangga di PUSPADA, sosialisasi kesehatan terkait kanker pada wanita, sosialisasi pengembangan usaha mikro kecil, sosialisasi mustahiqul, Sosialisasi mengenai Bahaya Narkoba, Sosialisasi Kamptu, Sosialisasi bebas asap rokok.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas : Peningkatan kapasitas building untuk relawan dan calon PPA, pengembangan usaha mikro kecil.
 - c. Program Pemberdayaan : Memfasilitasi pembuatan surat izin berusaha, IMR, dll, Memfasilitasi cek kesehatan, memfasilitasi konsultasi psikolog bagi keluarga, Kampung Bebas Asap Rokok.

Tempat Layanan Informasi Sahabat Perempuan di Kecamatan



Pembahasan Layanan Konsultasi Kepada Ibu-Ibu mengenai Kekerasan Rumah Tangga



Monitoring Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini



Sosialisasi mengenai parenting dan juga sosialisasi mengenai kesehatan bagi wanita

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kegiatan kecamatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan yaitu bentuk kegiatan pencegahannya adalah :

- Kebijakan pencegahan Kekerasan pada Perempuan : membuat pamflet kekerasan pada perempuan dan penjelasan hak-hak perempuan serta hukumnya. Melakukan Home Visit pada korban kekerasan.
- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KIP : Sosialisasi parenting di Puskas, Fasilitas Komunikasi Informasi Masyarakat Kecamatan, Melakukan pertemuan KRPPA di tiap Kelurahan, pendampingan kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual, Sekolah Lansia Tangguh.

Keterlibatan unsur dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan KIP

1. Lembaga Masyarakat :

Pusat Crisis Center Cahaya Mentari, KIM (Kelompok Informasi Masyarakat, KRPPA pada Kelurahan Kecamatan, Puskas di setiap RW.



2. Media Massa :

Instagram memberikan informasi terkait kegiatan wanita.



3. Dunia Usaha :

Siswa/siswi mengenal wirausaha dan pentingnya surat izin berusaha, memberikan bantuan paket usaha kepada perempuan.



4. AKTIVITAS :

Memberikan pelatihan kepada perempuan terutama ibu rumah tangga.



4. Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak

Bentuk layanan di kecamatan dan wilayah kelurahan bagi perempuan korban kekerasan yaitu :

1. Penetiran laporan dan/atau penjangkauan yang dilakukan kelurahan untuk diindak lanjuti kasusnya.
2. Pemberian informasi tentang hak korban, yaitu melakukan pertemuan yang diadakan oleh psikolog dan puskesmas dihadiri oleh dpln, kelurahan, kecamatan, wali keluarga.
3. Fasilitas pelayanan pemberian layanan kesehatan untuk wanita seperti cek kesehatan, senam bersama, cek kesehatan untuk berta, fasilitas cek kanker serviks, kesehatan buntil, kesehatan ibu melahirkan, dll.
4. Fasilitas pelayanan pemberian layanan psikologi yaitu layanan konseling di balai RW yaitu PUSPAGA.
5. Fasilitas pemberian layanan psikosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penulangan dan reintegrasi sosial yang diajukan Kelurahan untuk diuskan ke Kecamatan lalu ke Dinas Sosial.
6. Penyediaan layanan hukum yaitu seperti yang dilakukan urisa center cahaya menanti mengenai kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada perempuan untuk mendampingi sampai ke jalur hukum.
7. Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi yaitu memfasilitasi perempuan di Kecamatan Sawahan yang ingin membuka usaha mikro

kecil dengan mengajukan bantuan paket usaha dan juga memfasilitasi Survei ini berusaha.

8. Identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk penampungan korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera seperti pengajuan di lapas dan perlindungan di DPSAPNNB.
9. Fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas yaitu memberikan bantuan pemukiman dan fasilitas kesehatan seperti kuni roda dan juga pengobatan.
10. Koordinasi dan kerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya yaitu bekerjasama dengan lintas sektor (3 pilar) untuk monitoring dan membantu para korban kekerasan pada wanita, kekerasan pada anak, anak stunting dan anak disabilitas dengan membantu memberikan paket pemukiman dan paket kesehatan yang didampingi oleh puskesmas.
11. Pemenuhan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan yang dilakukan oleh crisis center cohaya mental yaitu kasus peradilan yang dikarenakan mengalami kekerasan pada rumah tangga sehingga pendampingan hukum hingga selesai.

5. Jenis layanan yang disediakan :

Bentuk Partisipasi masyarakat dan unsur pemerintah dalam penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.

1. Lembaga Masyarakat

Crisis Center Cohaya Mental penanganan kasus anak rentan



Crisis Center Cahaya Mandiri membagikan kasus kekerasan pada rumah tangga



2. Media Massa

Sosialisasi pada anak pentingnya pendidikan anak usia dini



3. Dunia Usaha

Memberikan bantuan usaha kepada perempuan



4. Akademisi

Sosialisasi terkait usaha untuk perempuan



5. Lainnya

Pemborisan bantuan kepala balaik stunting oleh lintas sektor



6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dilaksanakan agar menghidupkan dikomnitas peran. Berikut program-program kegiatan di Kecamatan yang mewujudkan kesetaraan gender yaitu :

Program kegiatan di kecamatan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender :

1. Sekolah Orang Tua Hebat yang dibekukan di setiap RW,
2. RUSPAGA di beberapa balaik RW di Tap Kelurahan,
3. Memberiuk Kampung Ramah Anak dan Perempuan agar tidak ada lagi kekerasan pada anak dan kekerasan pada perempuan.

4. Kelompok Informasi Masyarakat yaitu memfasilitasi masyarakat untuk saling sharing informasi.
 5. Kampung Bebas Asap Rokok di Tiap Kelurahan.
 6. Kampung Pancasila di tiap Kelurahan.
 7. Memberikan dukungan untuk karier dan pendidikan yaitu memberikan bantuan paket usaha dan juga pelunasan biaya sekolah dan ijazah.
 8. Memberikan penghargaan kepada perempuan yang berkontribusi banyak kepada masyarakat seperti penghargaan kepada anggota PKK yang telah mengabdikan lebih dari 5 tahun.
 9. Memberikan program kesehatan bagi lansia, perempuan, anak-anak, dan lain-lain seperti senam, cek kesehatan, dan penyandu. Adanya Penyandu Keluarga untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi semua anggota keluarga.
7. Ketertarikan untuk pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kecamatan Responsif Gender (lampirkan foto).

1. Lembaga Masyarakat



Sekolah Orang Tua Hebat sebuah sarana pendidikan informal berbasis di Balai RW yang tujuan untuk mempersiapkan pola asuh orang tua terhadap anaknya, hal tersebut untuk menegakkan permasalahan sosial dan kesehatan.

2. Media Massa



5. Dunia Usaha



Pemberian penghargaan untuk warga yang melakukan kepemimpinan lokal yang dibantu oleh pihak Universitas Airlangga.



Pemberian bantuan modal usaha berupa rombongan dari Dinas Kota Surabaya.

8. Akademisi



Pekan Imunisasi yang dilaksanakan serentak di sekolah SD, TK, dan PPT diseluruh wilayah Kecamatan Sawahan.



Kunjungan ke PAUD yang ada di Kecamatan Sawahan serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada Anak dan juga pola Asuh Orang Tua.

5. Lainnya



Pembelian barisan kurni noda dari Bupati Kota Surabaya.



Pembelangan kasus pada anak bersama keluarga, kesehatan, dan bisnis.

8. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan gender? Sebutkan dalam bentuk apa dan jelaskan?

Program Pemerintah Kota Surabaya yaitu SOTH, Padat Karya, yaitu membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Sawahan.

9. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Kecamatan dengan wilayah kelurahannya memiliki layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender?

1. Memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi gender.
2. Memberikan kesempatan mengutarakan opini atau suara dalam pertemuan.
3. Memberikan kesempatan untuk menjadi anggota dalam struktur organisasi seperti struktur RW, RT, dan lingkup Pemerintahan.
4. Memberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan saran mengenai kesetaraan gender pada forum yang dilakukan tiap minggu di tiap Kelurahan.
5. Prioritas pelayanan apapun bagi lansia.
6. Memberikan layanan konseling yang disediakan di balai RW Puspage.

10. Program pembangunan berbasis kowilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender.

Program pembangunan berbasis kowilayahan di kecamatan dengan wilayah kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender? (peduli ham, kampung wisata)

1. Kampung Bebas Asap Rokok untuk melindungi perempuan yang sedang hamil dan juga anak-anak.
2. Fasilitas Gedung Pemerintahan yang mengintegrasikan perspektif gender yaitu adanya ruang lactasi, ruangan dilarang merokok, kamar mandi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
3. Terapi di Kecamatan Sawahan.
4. Balai RW di Tiap Kelurahan sebagai fasilitas gedung untuk memberikan akses kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, dll.

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki program pembangunan berbasis kowilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender (jabuduri, lingkungan bukti).

1. Foto RW yang dipadukan PUSPAGA dan juga SOTH.



11. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan.

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan tingkat Kecamatan merurun/meningkat (dibandingkan dengan tahun sebelumnya).

12. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender (Bukti Dukung & Penjelasan)

Apakah kecamatan dan wilayah kelurahan memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?

1. Ruang laktasi (lampirkan).
2. Tempat penitipan anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan siapa pihak pengelolanya (lampirkan).
3. Layanan pengaduan kekerasan (lampirkan bukti).
4. Jumlah layanan pengaduan kekerasan.
5. Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan perlindungan hak perempuan setiap tahun.
6. Lainnya, sebutkan.

13. Pembinaan PUG Kecamatan kepada Kelurahan wilayah kerjanya termasuk dalam mawujudkan KRPPA

Apakah Kecamatan telah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PUG kepada Kelurahan.

Terkait penyelenggaraan PUG oleh Kecamatan dan Kelurahan pihak Kecamatan melaksanakan sosialisasi langsung ke lokasi dalam bentuk Cangkrukan yang diadakan tiap minggu di masing-masing Kelurahan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada tentang PUG.

14. Kelurahan telah perempuan dan peduli anak (Bakti Dukung dan lampiran Kecamatan sebagai Tim Pembina KRPPA semua Kelurahan wilayah kerjanya)

Apakah Kecamatan sebagai pembina KRPPA melakukan pengujian Kelurahan telah perempuan dan peduli anak Kelurahan?

1. Dalam bentuk apa?

Kecamatan telah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PUG kepada Kelurahan. Terkait penyelenggaraan PUG oleh Kecamatan dan Kelurahan pihak Kecamatan melaksanakan sosialisasi langsung ke lokasi dalam bentuk Cangkrukan yang diadakan tiap minggu di masing-masing Kelurahan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada tentang PUG. Adanya BGTI yaitu Sekolah Orang Tua Hebat. Adanya Sekolah Lansia Tangguh.

2. Bintangan teknis

Bintangin teknis yang diberikan yaitu melalui Sekolah Orang Tua Hebat dan Sekolah Lansia Tangguh.

3. Pembinaan

Memberikan sosialisasi terkait kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Kecamatan Sawahan serta didampingi oleh Kelurahan dan Puskesmas.

4. Pendampingan

Melakukan pendampingan pada korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Kecamatan Sawahan memiliki lembaga terkait penanganan kasus tersebut yaitu Crisis Center Cahaya Mentari.

5. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Terkait.

6. Evaluasi

Kelurahan dan Kecamatan melakukan evaluasi untuk kegiatan tahun depan.

Jumlah dan persentase Kelurahan yang tertina Kecamatan untuk KRPPA Semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Sawahan, yaitu :

1. Kelurahan Pakis
2. Kelurahan Putat Jaya
3. Kelurahan Binyu Urip
4. Kelurahan Petemon
5. Kelurahan Kupang Krajan
6. Kelurahan Sawahan

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi adalah proses penting dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan bahwa tujuan kesetaraan gender tercapai dan dampak yang diharapkan terwujud. Berikut adalah Langkah dalam pemantauan dan evaluasi PUG.

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Maner PUG .

- a. Peraturan Pemerintah (Mendagri) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346).
- d. UU No 17 Tahun 2007 Tentang RPJN 2005-2025 dan Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG).

- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- g. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2021, Kecamatan Sawahan Type II.

Pelaksanaan pemantauan money Kesehatan dan kesejahteraan PUG secara berkala? Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap ada kegiatan terkait money PUG.

Hot money PIG (Lampert)

Rank	Team	Score	Points	Goals	Assists	Shots	Time
1	Team A	100%	100	10	20	30	10:00
2	Team B	95%	95	9	19	29	09:50
3	Team C	90%	90	8	18	28	09:40
4	Team D	85%	85	7	17	27	09:30
5	Team E	80%	80	6	16	26	09:20
6	Team F	75%	75	5	15	25	09:10
7	Team G	70%	70	4	14	24	09:00
8	Team H	65%	65	3	13	23	08:50
9	Team I	60%	60	2	12	22	08:40
10	Team J	55%	55	1	11	21	08:30

3.4 Pengawasan

Pengawasan dalam penyelenggaraan PUG yang dilakukan oleh tiap Kelurahan di Kecamatan diawasi langsung oleh Inspektori. Dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban dan juga diampingi dengan Berita Acara.

Rekomendasi penyelenggaraan PUG dari APPI/Inspektori (Anggaran yang masuk dalam laporan PPRG). Apakah ap/inspektori memberikan rekomendasi penyelenggaraan PUG? Kelengkapan dokumen kebutuhan dan kualitas laporan PPRG Kecamatan dengan wilayah Kelurahan masing-masing.

3.5 Pelaporan

Kelurahan membuat pelaporan setiap kegiatan PUG melalui profil, mosaic, laporan tahunan, laporan tahunan, dan lain-lain. Setiap laporan yang dibuat akan dikoreksi dan dibuat evaluasi untuk Kecamatan agar kegiatan yang dilaksanakan untuk kedepannya menjadi maksimal dan baik.

Regulasi/ketepatan yang mengatur tentang Pelaporan PUG dan bentuk pelaporan PUG Kecamatan, bentuk regulasinya dan pedoman/petunjuk teknis berbantuan :

- a. Peraturan Pemerintah (Mendagri) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1348).
- d. UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJN 2005-2025 dan Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG).
- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokuk-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- g. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021, Kecamatan Sawahan Type B.

Penyelenggaraan PUG Kecamatan dalam laporan kinerja Pemerintah daerah?

a. Laki

Kecamatan Sawahan

No	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Kecamatan Sawahan

No	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

No	Item	Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1	Indikator Kualitas Sistem Keuangan	Indikator Kualitas Sistem Keuangan	95,0%	95,0%	95,0%



Tabel 3.15
Rencana Strategi target dan indikator
Sistem Strategi Pengembangan Kualitas Sistem Keuangan Tahun 2022

Indikator Strategi	Indikator Sistem	Target	Indikator	Target Sistem
Indikator Kualitas Sistem Keuangan	Indikator Kualitas Sistem Keuangan	95,0%	95,0%	95,0%

Capaian kinerja target Kualitas Sistem Keuangan pada Indikator Strategi dengan Indikator Sistem akan tercapai dengan target 95,0%. Indikator Kualitas Sistem Keuangan akan tercapai dengan target 95,0%. Indikator Kualitas Sistem Keuangan akan tercapai dengan target 95,0%. Indikator Kualitas Sistem Keuangan akan tercapai dengan target 95,0%.

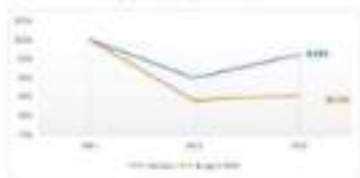
Indikator target dan indikator kualitas sistem keuangan 2 akan tercapai dengan target 95,0%.

Tabel 3.16
Rencana Strategi target dan indikator tahun 2021, 2022, dan 2023
Sistem Strategi Pengembangan Kualitas Sistem Keuangan

No	Indikator Strategi	2021		2022		2023	
		Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator
1	Indikator Kualitas Sistem Keuangan	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
2	Indikator Kualitas Sistem Keuangan	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
3	Indikator Kualitas Sistem Keuangan	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

berdasarkan data tingkat inflasi, nilai inflasi tahun berjalan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Setelah pada tahun 2019, inflasi sebagai tolak ukur inflasi telah 10%, karena dari angka ini akan membantu untuk mengetahui apakah pemerintah yang sangat bertanggung jawabnya terhadap nilai inflasi, yang di bawah inflasi akan ada GDP yang lebih dan sebaliknya akan ada masalah pemerintah yang memiliki inflasi yang lebih tinggi.

Gambar 1
Perbandingan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2019-2021



b. LKPD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

REKAPITULASI DATA KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

No.	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1.	Saldo awal tahun berjalan	0	0	0	0
2.	Saldo akhir tahun berjalan	0	0	0	0
3.	Saldo awal tahun berjalan	0	0	0	0

No.	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1.	Saldo awal tahun berjalan	0	0
2.	Saldo akhir tahun berjalan	0	0
3.	Saldo awal tahun berjalan	0	0
4.	Saldo akhir tahun berjalan	0	0
5.	Saldo awal tahun berjalan	0	0
6.	Saldo akhir tahun berjalan	0	0
7.	Saldo awal tahun berjalan	0	0

Saldo Awal

Saldo Akhir

Saldo Akhir

Saldo Akhir

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN KECAMATAN RESPONSIF GENDER (KRG) SINERGI DENGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA)

4.1 Analisis Kecamatan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Fish Bone, Map, Material, Metode dsb)

Di Kelurahan Putat Jaya khususnya lokasi makan Putat Jaya masih terdapat banyak anak Jalanan yang Putus Sekolah dari dalam maupun luar wilayah Kecamatan Sawahan dan di makan tersebut bila malam terlihat ramai, dan kini sudah dilakukan pendampingan dari PKBM. Daerah Makan Kembang Kuning juga sering sando oleh para PSK laki-laki dan perempuan maka setiap malam selalu dilakukan pemberian dan penangkapan.

Saat ini Walikota Surabaya tujuan utamanya yaitu mempercepat penurunan stunting di Kota Surabaya yang mana diketahui adanya stunting mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Maka langkah yang dilakukan yaitu percepatan penurunan stunting dengan melihat perkembangan ibu hamil dari usia janin hingga anak berusia 2 tahun. Jumlah stunting aktif di tahun 2024 saat ini di Kecamatan Sawahan berjumlah 26 anak. Stunting. Penyebab biologis stunting karena adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Sedangkan stunting karena faktor lain misalnya pola asuh, faktor ekonomi, faktor lingkungan sekitar. Pola asuh tersebut karena tidak memberikan makanan dan gizi yang baik untuk anak, serta tidak mengetahui gejala-gejala dini yang dialami oleh anak dimana orang tua hanya menganggap hal tersebut biasa padahal harus diperiksa secara rutin oleh pihak kesehatan. Melakukan percepatan penurunan stunting adalah upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara

konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas untuk menurunkan stunting tersebut. Pihak Puskesmas pun juga memantau bumi, tufas, bayi hingga usia 2 tahun yang memiliki benda-benda stunting secara berkala untuk menurunkan stunting tersebut.

Permasalahan lainnya yang dapat di bantu oleh Kecamatan yaitu tentang ijazah yang dimana masih ada beberapa anak di Kecamatan Sawahan yang membutuhkan biaya untuk pengambilan ijazah dikarenakan orang tua tidak mampu untuk membayar besarnya nominal pengambilan ijazah di Sekolahan Swasta. Selanjutnya permasalahan putus sekolah dimana efek pandemi sebelumnya anak-anak menjadi tidak semangat untuk bersekolah dan lebih memilih bekerja, membantu orang tua, dan juga bermain-mainan. Terdapat warga, dan anak lula sekolah yang masih belum bekerja dan juga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka diberikanlah pelatihan bagi warga yang penghasilan kurang dari empat juta.

4.2 Kesimpulan

Dengan melakukan analisis ini, Kecamatan dapat mengidentifikasi area area yang perlu diperbaiki atau diperkuat untuk mencapai status sebagai Kecamatan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak secara efektif dan berkelanjutan.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

1. Monitoring Pemukiman untuk Lansia Tunggal, Pasa, Yatim/Piatu.
2. Monitoring Pemeriksaan Jentik.
3. Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan.
4. Melakukan limitas kepada anggota forum Anak Kecamatan Sawahan.
5. Pendampingan Bumi dan Moner Bumi.
6. Kegiatan PKK Kecamatan Sawahan.
7. Sosialisasi Mengenai Stunting di Kecamatan Sawahan bekerjasama dengan Puskesmas di wilayah Kecamatan Sawahan.

8. Sosialisasi mengenai sistem pembayaran Qris bagi UMKM yang telah mendaftar NIB.
9. Pelatihan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait.
10. Turus Jajaz Sekolah SD, SMP, SMA/SMK.
11. Program Perbaikan rumah, pemberian kursi roda, alat bantu dengan stroller, tongkat bantu jalan.
12. Melakukan Outroach pemberdayaan kasus sosial.
13. Asuhan Rembulan tiap Sabtu untuk menjaga Wilayah agar aman.
14. Pelayanan Balai RW.
15. Puspaga di Setiap Balai RW.
16. SOTK Sekolah Orang Tua Hidayat untuk memberikan edukasi mengenai stunting.
17. Moner prasyanti balita dan lansia.
18. Memfasilitasi pemberian bantuan sosial.
19. Meningkatkan pemberian bantuan telur dan ayam untuk produktif.
20. Pembagian Sembako untuk Dapur Umum oleh struktur Kecamatan yang akan dibuat menjadi pentakoronan warga gakin.

**INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUKKAN KEBETARAAN GENDER (GENDER
EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain :

1. Monitoring Pemukiman untuk Lansia Tunggal, Pica, Yatim/Piatu.
2. Monitoring Pemukiman Jentik.
3. Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan.
4. Melakukan birik kepada anggota forum Anak Kecamatan Sawahan.
5. Pendampingan Bumil dan Manev Bumil.
6. Kegiatan PKK Kecamatan Sawahan.
7. Sosialisasi Mengenai Stunting di Kec. Sawahan bekerjasama dengan Puskesmas di wilayah Kecamatan Sawahan.
8. Sosialisasi mengenai sistem pembayaran Ors. bagi UNKM yang telah mendaftar NIB.
9. Pelatihan Pakejoran yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait.
10. Terbuka Jarak Sekolah SD, SMP, SMA/SMK.
11. Program Perbaikan rumah, pemberian kursi roda, alat bantu dengar, stroller, tongkat bantu jalan.
12. Melakukan Outreach pendampingan kasus sosial.
13. Asuhan Rembulan Isp Sebrta untuk menjaga Wilayah agar aman.
14. Pelayanan Balai RW.
15. Puspaga di Setiap Balai RW.
16. DOTH Sekolah Orang Tua Hadist untuk memberikan edukasi mengenai stunting.
17. Manev penyandu balita dan lansia.
18. Memfasilitas pemberian bantuan sosial.
19. Monitoring pemberian bantuan telur dan ayam untuk pra-stunting.

20. Pembagian Sembako untuk Dapur Umum oleh struktural Kecamatan yang akan dibuat menjadi pemukiman warga gakin.
21. Kegiatan Pendidikan PAUD dan SD untuk tawar PAUD ke SD yang menyertakan
22. Forum Diskusi Lansia dan Anak.

Lampiran

SK TP KRPPA (Kecamatan) Dan Kelurahan Responsif Gender (Kelurahan SK Oleh Kecamatan) berupa link/porto folio disesuaikan



Pemerintah Kota Surabaya
Kecamatan Sawahan

Author: Charles E. Harris, Jr., Editor: W. H. A. Edwards
1990, 400 pp., \$29.95

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-17
© The Author(s) 2013. Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613500000
jmi.sagepub.com

2013年12月15日 星期一 12:00:00

Author's address: *University of Twente, Enschede, The Netherlands*

1998-1999

PEMINTARAN DAN PEMBENTUKAN TIM BAK RESISTANSI GENDER RAGAM
PENGERTIHAN KAMPUNG LABANG
JEL. PRABALA, GADUVU, UPT. MCOLANJAN, KABUPATEN TANAH BUNYI

CONCLUSIONS

- [illegible]

berbagai hal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Pengembangan Hukum & Tahun 2018 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4329).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 637).
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang *“Pola Pengarusutamaan Gender untuk Masyarakat Perempuan dan Anak”*.
4. Peraturan Gubernur Bekasi Perkembangan Perencanaan dan Pelaksanaan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang *“Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak”*.
5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 tahun 2007 tentang *“Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak”*.
6. Peraturan Daerah Kota Sukabaya No 5 Tahun 2009 tentang *“Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan”* (Juga dalam Peraturan Daerah Kota Sukabaya).
7. Peraturan Daerah Kota Sukabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang *“Perencanaan Anak”*.
8. Peraturan Daerah Kota Sukabaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang *“Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabaya Nomor 14 tahun 2010 tentang *“Perencanaan dan Sistem Perangai Daerah Kota Sukabaya”**.
9. Peraturan Daerah Kota Sukabaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang *“Pengarusutamaan Gender”* (Lembaran Daerah Kota Sukabaya Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabaya Nomor 6).
10. Peraturan Walikota Sukabaya Nomor 22 Tahun 2015 tentang *“Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Sukabaya”*.

MEMUTUSKAN

Bersama:

RESMI

Ketertarikan dan Minat dari Tn. KR. Hengkiel Gendit (Kawal Perempuan dan Politik Anak) Kabupaten Selayu 116 Kecamatan Sawahan Kota Sukabaya dengan Daerah Anggota Pengerusi-Muskip sebagai mitra berkolaborasi dalam Langkah Berkeseluruhan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DABAT SARUKAN WISATA SIBIRADAYA

Korwil : 005.2 / 27 / WK / 000.8.20 / 2024

Tanggal : 01 Februari 2024

Tentang : Penetapan dan Pembentukan Tim RW Asasari Ganderi Kecamatan Perampayan dan Petakuruk (Kawadung KOPWA, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat) Kota Sintang Tahun 2024

**SUSUNAN TIM RW SAKAR PEREMPUN DAN PEDULI AWAK
KELURAHAN SAMPUL WEP**

Susunan Tim RW SAKAR PEREMPUN DAN PEDULI AWAK KELURAHAN SAMPUL WEP			
No	Nama	Instansi/Instansi Lain	Keahlian
1	00000000000000000000	Korwil	Keahlian
2	0000000000	Korwil	Keahlian
3	0000000000	Korwil	Keahlian
4	0000	Korwil	Keahlian
5	0000000000	Korwil	Keahlian
6	0000000000000000	Korwil	Keahlian
Tim RW SAKAR PEREMPUN DAN PEDULI AWAK			
1	0000000000	Korwil	Keahlian
2	0000000000	Korwil	Keahlian
3	0000000000	Korwil	Keahlian
4	0000000000	Korwil	Keahlian
5	0000000000	Korwil	Keahlian
6	0000000000	Korwil	Keahlian
7	0000000000	Korwil	Keahlian
8	0000000000	Korwil	Keahlian
9	0000000000	Korwil	Keahlian
10	0000000000	Korwil	Keahlian
11	0000000000	Korwil	Keahlian
12	0000000000	Korwil	Keahlian
13	0000000000	Korwil	Keahlian
14	0000000000	Korwil	Keahlian
15	0000000000	Korwil	Keahlian
16	0000000000	Korwil	Keahlian
17	0000000000	Korwil	Keahlian
Tim RW SAKAR PEREMPUN DAN PEDULI AWAK			
18	0000000000	Korwil	Keahlian
19	0000000000	Korwil	Keahlian
20	0000000000	Korwil	Keahlian

10	REKAMER KASUS (R/K)	Anggota	Kontrol/ Pengawasan Pelayanan/ Pengawasan Tanggap/ Reaksi/ Tindakan Lainnya
11	R/K/REK	Anggota	
12	REK/REK/REK	Anggota	
13	R/K/REK/REK	Anggota	

Lampiran 1: Daftar Anggota dan Organisasi yang Terlibat dalam Kegiatan			
No	Nama	Kelembagaan/ Organisasi/ Lembaga	Informasi
1	REKAMER KASUS (R/K)	Anggota	Kontrol
2	REKAMER KASUS (R/K)	Anggota	Kontrol (R/K)
3	REKAMER KASUS	Anggota	Kontrol (R/K)
4	REKAMER KASUS	Anggota	Kontrol (R/K)
5	REKAMER KASUS	Anggota	Kontrol (R/K)
6	REKAMER KASUS	Anggota	Kontrol (R/K)
Daftar Anggota/ Organisasi/ Lembaga			
1	REKAMER KASUS	Anggota	Kontrol/ Pengawasan Pelayanan/ Pengawasan Tanggap/ Reaksi/ Tindakan Lainnya
2	REKAMER KASUS	Anggota	
3	REKAMER KASUS	Anggota	
4	REKAMER KASUS	Anggota	
5	REKAMER KASUS	Anggota	
6	REKAMER KASUS	Anggota	
7	REKAMER KASUS	Anggota	
8	REKAMER KASUS	Anggota	
9	REKAMER KASUS	Anggota	
10	REKAMER KASUS	Anggota	
11	REKAMER KASUS	Anggota	
12	REKAMER KASUS	Anggota	
Daftar Anggota/ Organisasi/ Lembaga			
13	REKAMER KASUS	Anggota	Kontrol/ Pengawasan Pelayanan/ Pengawasan Tanggap/ Reaksi/ Tindakan Lainnya
14	REKAMER KASUS	Anggota	
15	REKAMER KASUS	Anggota	
16	REKAMER KASUS	Anggota	
17	REKAMER KASUS	Anggota	
18	REKAMER KASUS	Anggota	
19	REKAMER KASUS	Anggota	
20	REKAMER KASUS	Anggota	
21	REKAMER KASUS	Anggota	
22	REKAMER KASUS	Anggota	
23	REKAMER KASUS	Anggota	
24	REKAMER KASUS	Anggota	

16	Indonesian Batik	Anggita	
17	KA/Indonesian Batik	Anggita	
17	Indonesian Batik	Anggita	
18	Indonesian Batik	Anggita	

Kategori: Produk Produk Industri (Produk Industri Industri Industri)			
No.	Nama	Kategori Industri	Industri
1	Indonesian Batik	Industri	Industri
2	Indonesian Batik	Industri	Industri
3	Indonesian Batik	Industri	Industri
4	Indonesian Batik	Industri	Industri
5	Indonesian Batik	Industri	Industri
6	Indonesian Batik	Industri	Industri
Kategori: Produk Produk Industri (Produk Industri Industri Industri)			
7	Indonesian Batik	Industri	Industri
8	Indonesian Batik	Industri	Industri
9	Indonesian Batik	Industri	Industri
10	Indonesian Batik	Industri	Industri
11	Indonesian Batik	Industri	Industri
12	Indonesian Batik	Industri	Industri
13	Indonesian Batik	Industri	Industri
14	Indonesian Batik	Industri	Industri
15	Indonesian Batik	Industri	Industri
16	Indonesian Batik	Industri	Industri
17	Indonesian Batik	Industri	Industri
Kategori: Produk Produk Industri (Produk Industri Industri Industri)			
18	Indonesian Batik	Industri	Industri
19	Indonesian Batik	Industri	Industri
20	Indonesian Batik	Industri	Industri
21	Indonesian Batik	Industri	Industri
22	Indonesian Batik	Industri	Industri
23	Indonesian Batik	Industri	Industri
24	Indonesian Batik	Industri	Industri
25	Indonesian Batik	Industri	Industri

19	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
20	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	
21	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	
22	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	
23	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	
24	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	
25	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	
26	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	

DAFTAR NAMA DAN JABATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN			
No	Nama	Pada Jabatan	Alamat
1	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
2	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
3	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
4	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
5	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
6	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan			
7	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
8	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
9	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
10	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
11	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
12	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
13	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
14	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan			
15	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
16	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru
17	REDA JUNGLE (2015)	Anggota	Baru

			nama
--	--	--	------

Lampiran 10: Daftar Soal dan Jawaban untuk Tes Kemampuan Akademik			
No.	Soal	Jawaban	Referensi
1.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 1
2.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 2
3.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 3
4.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 4
5.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 5
6.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 6
Daftar Soal dan Jawaban untuk Tes Kemampuan Akademik			
7.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 7
8.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 8
9.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 9
10.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 10
11.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 11
Daftar Soal dan Jawaban untuk Tes Kemampuan Akademik			
12.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 12
13.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 13
14.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 14
15.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 15
16.	Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan.	100	Soal 16





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN SAWAHAN

Jalan Pahlawan Surabaya 114, Surabaya
Telp. (031) 4071 981
Email: sawahan.go.id / Email: satgawahan@kemaherap.go.id

KETERANGAN: LAMBAT SAHABAT KOTA SURABAYA

KECAMATAN - 401 11 / 20 100 1 000 0 001 000

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN SAKIP POKJAWA PUTAT JAYA TENTANG
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
KAWASAN PUTAT JAYA, KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2020

KAWASAN SAWAHAN

- | | |
|---------|---|
| Sawahan | <ul style="list-style-type: none">1. Jalan Jalan Candi, Sawahan dan Jalan Pahlawan, Sawahan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya.2. Jalan Jalan Candi, Sawahan dan Jalan Pahlawan, Sawahan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya.3. Jalan Jalan Candi, Sawahan dan Jalan Pahlawan, Sawahan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. |
| Sawahan | <ul style="list-style-type: none">1. Jalan Jalan Candi, Sawahan dan Jalan Pahlawan, Sawahan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya.2. Jalan Jalan Candi, Sawahan dan Jalan Pahlawan, Sawahan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya.3. Jalan Jalan Candi, Sawahan dan Jalan Pahlawan, Sawahan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, dan Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. |

Perkembangan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Dasar Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tidak Putus Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengawasan dan Gaster di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengawasan Gaster di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 521).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Perkembangan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Forum Fokus (Fokuspok) Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak).
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Perkembangan Anak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kasejahteraan Layak Anak.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Perkembangan Anak Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Kabupaten/Kota sebagai Model Desa Berbasis Perempuan dan Peleji Anak.
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.8 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya.
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perkembangan Anak.
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021

kegiatan Penelitian yang Penelitian Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Survei Penelitian Daerah Kota Surabaya;

3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pengantar/Format Gender (2020) Menyangkut Daerah Kota Surabaya;

KEPUTUSAN

Menetapkan

KEPUTUSAN Menetapkan dan Menetapkan Tim RW Responsif Gender (Ranah Perempuan dan Petak Anak) – Kecamatan Pateh Jawa Barat dan Surabaya Kota Surabaya dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

PEDUR Tim RW Responsif Gender (Ranah Perempuan dan Petak Anak) sebagai berikut:

1. Ketua: Kepala RW Responsif Gender (Ranah Perempuan dan Petak Anak) kecamatan Kecamatan Ranah Perempuan dan Petak Anak (KORPA) dengan penunjukan Kepala Kecamatan dan Kecamatan sebagai anggota;
2. Ketua: Kepala RW Responsif Gender (Ranah Perempuan dan Petak Anak) kecamatan Kecamatan Ranah Perempuan dan Petak Anak (KORPA) dan sebagai;
3. Ketua: Kepala RW Responsif Gender (Ranah Perempuan dan Petak Anak) kecamatan Kecamatan Ranah Perempuan dan Petak Anak (KORPA) dan sebagai;
4. Ketua: Kepala RW Responsif Gender (Ranah Perempuan dan Petak Anak) kecamatan Kecamatan Ranah Perempuan dan Petak Anak (KORPA) dan sebagai;

- KEPUTUSAN** : Dalam Rangka Terwujudnya pada tahun ini akan terwujudnya
 pada tahun ini akan terwujudnya pada tahun ini akan terwujudnya
 pada tahun ini akan terwujudnya pada tahun ini akan terwujudnya
- KEPUTUSAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2024, dengan
 ketentuan apabila terdapat kekhilafan dalam pelaksanaannya akan
 diadakan perubahan sebagai berikut ini.

Disamping ini: Surabaya
 Pada tanggal: 17 Januari 2024



Surabaya, 17 Januari 2024

1. Kepala Surabaya & Kepala Surabaya (sebagai sekretaris)
2. Sekretaris
3. Sekretaris
4. Kepala Surabaya
5. Kepala Surabaya (sebagai sekretaris)
6. Kepala Surabaya
7. Kepala Surabaya
8. Kepala Surabaya

LAMPYRAN KEPUTUSAN CABANG SUKSES KOTA SURABAYA

Formulir : 002.2-2019-04-000 9.20-2024

Tanggal : 31 Januari 2024

Terhadap : Pemilihan dan Pembentukan Tim DPA Regional Gender (Rahmah Fawwazul Idris Putri Anak Jemberdang KIRPA, Kalsiatari Putri Jaya Padochast, Suwasthi Rinta Samboya Teratai 2023)

**SUSUNAN TIM DAN KAMAH PERSEMPLIAN (DAN PERBA) ANGG
KELURAHAN PUTAT JAYA**

PAK

No	Nama	Keahlian dan Jabatan	Keterangan
1	Rahmah Fawwazul Idris Putri Anak Jemberdang KIRPA	Presiden	Link
2	Kalsiatari Putri Jaya Padochast	Ketua	Link
3	Suwasthi Rinta Samboya Teratai 2023	Ketua KIRPA	
4	Rahmah Fawwazul Idris Putri Anak Jemberdang KIRPA	Keanggotaan	
5	Kalsiatari Putri Jaya Padochast	Keanggotaan	
6	Suwasthi Rinta Samboya Teratai 2023	Keanggotaan	
Wakil Perwakilan Perempuan			
7	Tim	Ketua Perwakilan Perempuan	
8	Tim	Anggota	
9	Tim	Anggota	
10	WAKIL KIRPA	Anggota	
11	WAKIL KIRPA	Anggota	
12	WAKIL KIRPA	Anggota	

Daftar Pendalaman Anak

13. Rona	Seni Ciptaan Daftar Pendalaman Anak	
14. Adu	Agenda	
15. Rona	Agenda	

PSK

No	Nama	Substansi dalam Tim	Keterangan
1	Myra Fitri Marinda, S.Pd	Profil	100%
2	DAI Kusuma	Itin	90%
3	Herma Nurul	Kelelahan	95%
4	Rona	Kelelahan	95%
5	Yana Rini	Kelelahan	95%
6	Wah. Rini	Kelelahan Kelelahan dan (Kelelahan Rini Rini Kelelahan Rini Rini)	95%

Daftar Pendalaman Peningkatan

1	Wah. Rini	Seni Ciptaan Daftar Pendalaman dan Peningkatan	95%
2	Rona	Agenda	95%
3	Rona	Agenda	95%
4	Wah. Rini	Agenda	95%

Daftar Pendalaman Anak

13. Rona	Seni Ciptaan Daftar Pendalaman Anak	
14. Adu	Agenda	
15. Rona	Agenda	

[illegible]

No	Isi	Kategori dan Tipe	Keuntungan
1	Prinsip Kerja Mekanisme, 3.5 hp	Prinsip	100%
2	Model Mekanisme	Konstruksi	100%
3	Agar	Waktu Kerja	90%
4	Salah satu	Konstruksi	100%
5	Salah satu	Konstruksi	100%
6	Salah satu	Konstruksi	100%
7	Salah satu	Konstruksi	100%
8	Salah satu	Konstruksi	100%
9	Salah satu	Konstruksi	100%
10	Salah satu	Konstruksi	100%
11	Salah satu	Konstruksi	100%
12	Salah satu	Konstruksi	100%
13	Salah satu	Konstruksi	100%
14	Salah satu	Konstruksi	100%
15	Salah satu	Konstruksi	100%
16	Salah satu	Konstruksi	100%
17	Salah satu	Konstruksi	100%
18	Salah satu	Konstruksi	100%
19	Salah satu	Konstruksi	100%
20	Salah satu	Konstruksi	100%
21	Salah satu	Konstruksi	100%
22	Salah satu	Konstruksi	100%
23	Salah satu	Konstruksi	100%
24	Salah satu	Konstruksi	100%
25	Salah satu	Konstruksi	100%
26	Salah satu	Konstruksi	100%
27	Salah satu	Konstruksi	100%
28	Salah satu	Konstruksi	100%
29	Salah satu	Konstruksi	100%
30	Salah satu	Konstruksi	100%
31	Salah satu	Konstruksi	100%
32	Salah satu	Konstruksi	100%
33	Salah satu	Konstruksi	100%
34	Salah satu	Konstruksi	100%
35	Salah satu	Konstruksi	100%
36	Salah satu	Konstruksi	100%
37	Salah satu	Konstruksi	100%
38	Salah satu	Konstruksi	100%
39	Salah satu	Konstruksi	100%
40	Salah satu	Konstruksi	100%
41	Salah satu	Konstruksi	100%
42	Salah satu	Konstruksi	100%
43	Salah satu	Konstruksi	100%
44	Salah satu	Konstruksi	100%
45	Salah satu	Konstruksi	100%
46	Salah satu	Konstruksi	100%
47	Salah satu	Konstruksi	100%
48	Salah satu	Konstruksi	100%
49	Salah satu	Konstruksi	100%
50	Salah satu	Konstruksi	100%
51	Salah satu	Konstruksi	100%
52	Salah satu	Konstruksi	100%
53	Salah satu	Konstruksi	100%
54	Salah satu	Konstruksi	100%
55	Salah satu	Konstruksi	100%
56	Salah satu	Konstruksi	100%
57	Salah satu	Konstruksi	100%
58	Salah satu	Konstruksi	100%
59	Salah satu	Konstruksi	100%
60	Salah satu	Konstruksi	100%
61	Salah satu	Konstruksi	100%
62	Salah satu	Konstruksi	100%
63	Salah satu	Konstruksi	100%
64	Salah satu	Konstruksi	100%
65	Salah satu	Konstruksi	100%
66	Salah satu	Konstruksi	100%
67	Salah satu	Konstruksi	100%
68	Salah satu	Konstruksi	100%
69	Salah satu	Konstruksi	100%
70	Salah satu	Konstruksi	100%
71	Salah satu	Konstruksi	100%
72	Salah satu	Konstruksi	100%
73	Salah satu	Konstruksi	100%
74	Salah satu	Konstruksi	100%
75	Salah satu	Konstruksi	100%
76	Salah satu	Konstruksi	100%
77	Salah satu	Konstruksi	100%
78	Salah satu	Konstruksi	100%
79	Salah satu	Konstruksi	100%
80	Salah satu	Konstruksi	100%
81	Salah satu	Konstruksi	100%
82	Salah satu	Konstruksi	100%
83	Salah satu	Konstruksi	100%
84	Salah satu	Konstruksi	100%
85	Salah satu	Konstruksi	100%
86	Salah satu	Konstruksi	100%
87	Salah satu	Konstruksi	100%
88	Salah satu	Konstruksi	100%
89	Salah satu	Konstruksi	100%
90	Salah satu	Konstruksi	100%
91	Salah satu	Konstruksi	100%
92	Salah satu	Konstruksi	100%
93	Salah satu	Konstruksi	100%
94	Salah satu	Konstruksi	100%
95	Salah satu	Konstruksi	100%
96	Salah satu	Konstruksi	100%
97	Salah satu	Konstruksi	100%
98	Salah satu	Konstruksi	100%
99	Salah satu	Konstruksi	100%
100	Salah satu	Konstruksi	100%

Uda ng Pambatas ng Ponganan

No	Nama	Kelas dan Mata Pelajaran	Nilai
1	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
2	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
3	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
4	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
5	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
6	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
7	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
8	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
9	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85
10	Adrian	IPA 10 SMA Negeri 100	85

Etik og Fortroligheds Aftale

11	OTT WEDNESDAY	Season 3: The Day After Tomorrow Revenge: The Day After Tomorrow Apocalypse	4001
12	Friday	Apocalypse	4002
13	RE-ONE: REVENGE 2	Apocalypse	4003
14	OTT WEDNESDAY	Apocalypse	4004

PMW TV

No	Bahan	Komponen sistem Tipe	Keterangan
1	Uyir: Pori Shims (tebal 5,5p)	Pengisi	Isi
2	Wolfs Gypsum	Perek	isi

1. Wakil Bupati	Kabupaten	
2. Perencanaan	Kabupaten	
3. Tim (Tim Wawancara)	Kabupaten	
4. Asisten Bk. Bupati	Kantor Bupati Kantor Bupati (Pusat) Kabupaten (Kantor Bupati)	

Bidang Pemerintahan Kecamatan

7. Kepala Kecamatan	Kantor Kecamatan Bidang Pemerintahan Kantor Kecamatan	
8. Sekretaris Kecamatan	Kantor	
9. Kepala Sub. Kecamatan	Kantor	
10. Kepala Desa	Kantor	
11. Kepala	Kantor	
12. Kepala	Kantor	
13. Kepala	Kantor	
14. Kepala	Kantor	
15. Kepala	Kantor	
16. Kepala	Kantor	
17. Kepala	Kantor	
18. Kepala	Kantor	
19. Kepala	Kantor	

Bidang Pemerintahan Desa

20. Kepala	Kantor Kecamatan Bidang Pemerintahan Desa	
21. Kepala	Kantor	
22. Kepala	Kantor	

21. Indragunadi	Anggota	
22. Gede Kertanadi	Anggota	
23. Gede Maheswari	Anggota	
24. Irena Budhi	Anggota	
25. Vikiari	Anggota	
26. Supriat	Anggota	
27. Huda Fatah Mardiana	Anggota	

PMK V

No.	Nama	Kewajiban & Jabatan Dua	Keterangan
1.	Timas Eka Wicakanti, S.Pd	Pengantar	2000
2.	Gustadi	Latihan	100
3.	Paul Supriatna	Wakil Ketua	PT 7
4.	Nanda Pambudi	Anggota	Sal. 1000
5.	Purbanda	Anggota	PT 1
6.	Gustadi	Koordinator Intervensi & Dink (Pemeriksaan Kesehatan) Dink Terpadu	PT 31

Dikang Pembentukan Peningkatan

No.	Nama	Dimas Koordinator Dink (Pemeriksaan Kesehatan Terpadu) Peningkatan	Keterangan
7.	Timas Eka Wicakanti		PT 1
8.	Gustadi	Anggota	PT 4
9.	Luisa	Anggota	PT 1
10.	Indragunadi	Anggota	PT 1
11.	Indira Pambudi	Anggota	PT 1
12.	Indragunadi	Anggota	PT 1

11. Anggapu Vathangga	Angga	000
14. Wamuk	Angga	000
17. Sri Wathari	Angga	000
18. (Sri Wathari)	Angga	Kampung Selayan
17. Sri Wathari	Angga	Kampung Selayan
10. Sri Wathari	Angga	000
10. Sri Wathari (Angga)	Angga	Daerah PAK
20. Sri Wathari	Angga	Daerah PAK

Daftar Pustaka Angga

20. Sri Wathari	Angga	000
20. Sri Wathari	Angga	001
20. Sri Wathari	Angga	002
24. Sri Wathari	Angga	003
20. Sri Wathari	Angga	004
20. Sri Wathari	Angga	005
20. Sri Wathari	Angga	006
20. Sri Wathari	Angga	007
20. Sri Wathari	Angga	Daerah PAK
20. Sri Wathari	Angga	008
20. Sri Wathari	Angga	009
20. Sri Wathari	Angga	010
20. Sri Wathari	Angga	011
20. Sri Wathari	Angga	012
20. Sri Wathari	Angga	013
20. Sri Wathari	Angga	014
20. Sri Wathari	Angga	015
20. Sri Wathari	Angga	016
20. Sri Wathari	Angga	017
20. Sri Wathari	Angga	018
20. Sri Wathari	Angga	019
20. Sri Wathari	Angga	020
20. Sri Wathari	Angga	021
20. Sri Wathari	Angga	022
20. Sri Wathari	Angga	023
20. Sri Wathari	Angga	024
20. Sri Wathari	Angga	025
20. Sri Wathari	Angga	026
20. Sri Wathari	Angga	027
20. Sri Wathari	Angga	028
20. Sri Wathari	Angga	029
20. Sri Wathari	Angga	030
20. Sri Wathari	Angga	031
20. Sri Wathari	Angga	032
20. Sri Wathari	Angga	033
20. Sri Wathari	Angga	034
20. Sri Wathari	Angga	035
20. Sri Wathari	Angga	036
20. Sri Wathari	Angga	037
20. Sri Wathari	Angga	038
20. Sri Wathari	Angga	039
20. Sri Wathari	Angga	040
20. Sri Wathari	Angga	041
20. Sri Wathari	Angga	042
20. Sri Wathari	Angga	043
20. Sri Wathari	Angga	044
20. Sri Wathari	Angga	045
20. Sri Wathari	Angga	046
20. Sri Wathari	Angga	047
20. Sri Wathari	Angga	048
20. Sri Wathari	Angga	049
20. Sri Wathari	Angga	050
20. Sri Wathari	Angga	051
20. Sri Wathari	Angga	052
20. Sri Wathari	Angga	053
20. Sri Wathari	Angga	054
20. Sri Wathari	Angga	055
20. Sri Wathari	Angga	056
20. Sri Wathari	Angga	057
20. Sri Wathari	Angga	058
20. Sri Wathari	Angga	059
20. Sri Wathari	Angga	060
20. Sri Wathari	Angga	061
20. Sri Wathari	Angga	062
20. Sri Wathari	Angga	063
20. Sri Wathari	Angga	064
20. Sri Wathari	Angga	065
20. Sri Wathari	Angga	066
20. Sri Wathari	Angga	067
20. Sri Wathari	Angga	068
20. Sri Wathari	Angga	069
20. Sri Wathari	Angga	070
20. Sri Wathari	Angga	071
20. Sri Wathari	Angga	072
20. Sri Wathari	Angga	073
20. Sri Wathari	Angga	074
20. Sri Wathari	Angga	075
20. Sri Wathari	Angga	076
20. Sri Wathari	Angga	077
20. Sri Wathari	Angga	078
20. Sri Wathari	Angga	079
20. Sri Wathari	Angga	080
20. Sri Wathari	Angga	081
20. Sri Wathari	Angga	082
20. Sri Wathari	Angga	083
20. Sri Wathari	Angga	084
20. Sri Wathari	Angga	085
20. Sri Wathari	Angga	086
20. Sri Wathari	Angga	087
20. Sri Wathari	Angga	088
20. Sri Wathari	Angga	089
20. Sri Wathari	Angga	090
20. Sri Wathari	Angga	091
20. Sri Wathari	Angga	092
20. Sri Wathari	Angga	093
20. Sri Wathari	Angga	094
20. Sri Wathari	Angga	095
20. Sri Wathari	Angga	096
20. Sri Wathari	Angga	097
20. Sri Wathari	Angga	098
20. Sri Wathari	Angga	099
20. Sri Wathari	Angga	100

Table VI

No.	Item	Keterangan Item Dua	Estimasi
1	SETIA (SETIA)	1000000	10000
2	SEKUTU (SEKUTU)	1000000	10000000
3	SEKUTU (SEKUTU)	1000000	10000000
4	SEKUTU (SEKUTU)	1000000	1000
5	SEKUTU (SEKUTU)	1000000	1000
6	SEKUTU (SEKUTU)	1000000 1000000000000 (1000000000000)	1000
		1000000000000	
SEKUTU (SEKUTU) (SEKUTU)			
7	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000 1000000000000 1000000000000	10000000
8	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	
9	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
10	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
11	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
12	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
13	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
14	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
15	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
16	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
17	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
18	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000
19	SEKUTU (SEKUTU)	1000000000000	1000

BANKING PERFORMANCE RATING			
		2019-2020 BANKING PERFORMANCE RATING	
20	STATE BANK	GOOD	4.0
21	STATE BANK	GOOD	4.0
22	STATE BANK	GOOD	4.0
23	STATE BANK	GOOD	4.0
24	STATE BANK	GOOD	4.0
25	STATE BANK	GOOD	4.0
26	STATE BANK	GOOD	4.0
27	STATE BANK	GOOD	4.0
28	STATE BANK	GOOD	4.0
29	STATE BANK	GOOD	4.0
30	STATE BANK	GOOD	4.0
31	STATE BANK	GOOD	4.0

1998-1999

No	Daerah	Kontribusi dalam TPA	Estimasi
1	Daerah Istimewa Aceh, N. Sum.	Perikanan	14,00
2	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
3	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
4	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
5	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
6	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
7	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
8	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
9	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100
10	Daerah Istimewa Aceh	Perikanan	100

10	Donnasteggen	Anggeri	803
11	Donnasteggen	Anggeri	803
12	Donnasteggen	Anggeri	803
13	Donnasteggen	Anggeri	803
14	Donnasteggen	Anggeri	803
15	Donnasteggen	Anggeri	803
16	Donnasteggen	Anggeri	803
17	Donnasteggen	Anggeri	803
18	Donnasteggen	Anggeri	803
19	Donnasteggen	Anggeri	803
20	Donnasteggen	Anggeri	803
21	Donnasteggen	Anggeri	803

Daftar Penerimaan Anak

12	Daftar Penerimaan Anak	Daftar Penerimaan Anak	803
13	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
14	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
15	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
16	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
17	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
18	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
19	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
20	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
21	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
22	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
23	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
24	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
25	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
26	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
27	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
28	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803
29	Daftar Penerimaan Anak	Anggeri	803

PM-VB

No	Item	Relevansi dalam TIK	Estimasi
1	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
2	ITEM, 50	Proses	100
3	ITEM 50000	Waktu Kerja	12.2
4	ITEM	Skema	100
5	ITEM 100	Skema	100
6	ITEM 100	Skema	100
7	ITEM 100	Skema	100
8	ITEM 100	Skema	100
9	ITEM 100	Skema	100
10	ITEM 100	Skema	100
11	ITEM 100	Skema	100
12	ITEM 100	Skema	100
13	ITEM 100	Skema	100
14	ITEM 100	Skema	100
15	ITEM 100	Skema	100
16	ITEM 100	Skema	100
17	ITEM 100	Skema	100
18	ITEM 100	Skema	100
19	ITEM 100	Skema	100
20	ITEM 100	Skema	100
21	ITEM 100	Skema	100
22	ITEM 100	Skema	100
23	ITEM 100	Skema	100
24	ITEM 100	Skema	100
25	ITEM 100	Skema	100
26	ITEM 100	Skema	100
27	ITEM 100	Skema	100
28	ITEM 100	Skema	100
29	ITEM 100	Skema	100
30	ITEM 100	Skema	100
31	ITEM 100	Skema	100
32	ITEM 100	Skema	100
33	ITEM 100	Skema	100
34	ITEM 100	Skema	100
35	ITEM 100	Skema	100
36	ITEM 100	Skema	100
37	ITEM 100	Skema	100
38	ITEM 100	Skema	100
39	ITEM 100	Skema	100
40	ITEM 100	Skema	100
41	ITEM 100	Skema	100
42	ITEM 100	Skema	100
43	ITEM 100	Skema	100
44	ITEM 100	Skema	100
45	ITEM 100	Skema	100
46	ITEM 100	Skema	100
47	ITEM 100	Skema	100
48	ITEM 100	Skema	100
49	ITEM 100	Skema	100
50	ITEM 100	Skema	100

PM-IX

No	Item	Relevansi dalam TIK	Estimasi
1	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
2	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
3	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
4	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
5	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
6	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
7	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
8	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
9	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
10	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
11	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
12	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
13	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
14	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
15	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
16	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
17	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
18	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
19	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
20	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
21	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
22	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
23	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
24	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
25	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
26	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
27	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
28	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
29	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
30	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
31	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
32	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
33	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
34	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
35	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
36	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
37	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
38	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
39	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
40	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
41	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
42	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
43	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
44	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
45	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
46	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
47	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
48	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
49	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%
50	Item: Item Standard, 50kg	Proses	100%

6	Manajemen Proyek	Penelitian	Penelitian IPS
8	Agensi Persepsi	Wawancara dan Data / Penelitian Berbasis Tesis Berbasis	Skripsi IPS

Daftar Pendidikan dan Pengalaman

7	Studi Magister	Gelar Sarjana Pendidikan Matematika dengan Peminatan	PKA
8	Struktur	Magister	2009
9	Studi Magister	Magister	2011
10	Magister	Magister	2011
11	Magister	Magister	2011

Daftar Pendidikan Anak

12	Studi Pasca	Gelar Sarjana Pendidikan Matematika Anak	1983
13	Magister	Magister	1983
14	Magister	Magister	2001
15	Magister	Magister	2001
16	Magister	Magister	2001
17	Magister	Magister	2001
18	Magister	Magister	2001

Referensi

No	Nama	Kategori dan Tipe	Keterangan
1	David, R. R. (2000). <i>Ilmu</i>	Penelitian	Libris
2	Ilmu	Ilmu	Libris
3	Ilmu	Ilmu	Libris
4	Ilmu	Ilmu	Libris
5	Ilmu	Ilmu	Libris

6	NEUTRUMARI	Kontribusi Intensifikasi Dulu (Dusman, Marudak Dulu Tersebut)	
Idang Pendidikan Peningkatan			
7	KEBUNDAKAR	Kontribusi Idang PeningkatanDulu Dulu Peningkatan	
8	KEBUNDAKAR	Kontribusi	
9	KEBUNDAKAR	Kontribusi	
10	KEBUNDAKAR	Kontribusi	
Idang Pendidikan Anak			
11	KEBUNDAKAR	Kontribusi Idang Pendidikan Anak	
12	KEBUNDAKAR	Kontribusi	
13	KEBUNDAKAR	Kontribusi	

File 3

No	Nama	Kontribusi Dulu	Kontribusi
1	KEBUNDAKAR	Kontribusi	Kontribusi
2	KEBUNDAKAR	Kontribusi	Kontribusi
3	KEBUNDAKAR	Kontribusi	Kontribusi
4	KEBUNDAKAR	Kontribusi	Kontribusi
5	KEBUNDAKAR	Kontribusi	Kontribusi
6	KEBUNDAKAR	Kontribusi Intensifikasi Dulu (Dusman, Marudak Dulu Tersebut)	Kontribusi
Idang Pendidikan Peningkatan			
7	KEBUNDAKAR	Kontribusi Idang PeningkatanDulu Dulu Peningkatan	Kontribusi
8	KEBUNDAKAR	Kontribusi	Kontribusi

9	JOHN J. MURRAY	Anggota	UMI
Dikang Pendidikan Anak			
10	RIYUNUS	Ketua Koordinasi Bidang Pendidikan Anak	UMI
11	MAED PUSP	Anggota	UMI
12	UMAT	Anggota	UMI

PM XI

No	Nama	Kontak dan alamat	Keterangan
1	Oryan Irena Wismaharta, S.Ep	Pecutan	Utama
2	Putriyus Andrianto	Setra	PM
3	Dianono	Wakil Ketua	
4	Karjono	Anggota	
5	Kirana Nara	Anggota	
6	Haris Ramadani	Koordinator Jaringan Sosial (Jas) / Koordinator Kemandirian (Kema)	

Dikang Pendidikan Perempuan

7	Dr. Rikana	Ketua Koordinasi Bidang Pendidikan Perempuan	
8	Dr. Yuliana	Anggota	
9	Dr. Yuliana	Anggota	

Dikang Pendidikan Anak

10	Amalia	Ketua Koordinasi Bidang Pendidikan Anak	
11	Amalia	Anggota	
12	Dr. Wajid	Anggota	

PTB XII

No	Nama	Kemufakatan dalam Tim	Keterangan
1	Sherry Erika Haskomah, S.Pd	Presiden	100%
2	DEBORA YULIA JULIANA	Eksek	90%
3	ALYANOR	Wakil Ketua	85%
4	Doni Agus Armand	Anggota	80%
5	Arbani	Anggota	80% dan 90%
6	Indrawati	Wakil Ketua Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	80%
Daftar Pemungutan Suara			
7	Wahid Wahid	Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	80%
8	Wahid	Anggota	80%
9	Wahid	Anggota	80%
10	Wahid	Anggota	80%
11	Wahid	Anggota	80%
Daftar Pemungutan Anak			
12	Wahid	Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	85%
13	Wahid	Anggota	80%
14	Wahid	Anggota	80%
15	Wahid	Anggota	85%
16	Wahid	Anggota	85%

PM XIV

No	Nama	Kontribusi dalam Tim	Keterampilan
1	Sherry Fani Handayani, 3 Dik	Presiden	Leader
2	Wahyuni	Eksek	PM
3	Shi Muhammad	Wakil Ketua	
4	Ayu Nurhidayah	Sekretaris	
5	Ayu Nurhidayah	Manajemen	
6	Vita Elviana	Manajemen Inovasi dan Teknologi (Penerapan Teknologi dalam Tim)	

Kidang Pendidikan dan Pengajaran

7	Shaghi Laila Nur	Manajemen Pendidikan dan Pengajaran	
8	Shi Nurhidayah	Anggota	
9	Shaghi Nurhidayah	Anggota	
10	Shaghi Nurhidayah	Anggota	
11	Shi Nurhidayah	Anggota	

Kidang Pendidikan Anak

12	Shi Nurhidayah	Manajemen Pendidikan dan Pengajaran	
13	Shi Nurhidayah	Anggota	
14	Shi Nurhidayah	Anggota	

PM XV

No	Nama	Kontribusi dalam Tim	Keterampilan
1	Sherry Fani Handayani, 3 Dik	Presiden	Leader
2	Shaghi Nurhidayah	Anggota	PM
3	Shi Nurhidayah	Wakil Ketua	
4	Shi Nurhidayah	Manajemen	

2.	Geoffrey Hinton dan Yoshua Bengio	Neural Networks	
3.	James D. Watson	Klasifikasi Sequensial Data (Perseptron, Hidden Units, TensorFlow)	
Daftar Pustaka dan Pustaka			
1.	Artificial Intelligence	Artificial Intelligence Principles and Practice Third Edition	
2.	Management	Artificial	
3.	Artificial Neural Networks	Artificial	
4.	Artificial Intelligence	Artificial	
5.	Artificial Neural Networks	Artificial	
6.	Artificial Neural Networks	Artificial	
7.	Artificial Neural Networks	Artificial	
8.	Artificial Neural Networks	Artificial	
Daftar Pustaka dan Pustaka			
1.	Artificial	Artificial Neural Networks Principles and Practice Third Edition	
2.	Artificial	Artificial	
3.	Artificial	Artificial	
4.	Artificial Neural Networks	Artificial	
5.	Artificial	Artificial	



Foto Dokumentasi Kegiatan responsif gender Kecamatan Sawahan

Kegiatan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan



Musterbang Melibatkan Urat Perempuan Termasuk Organisasi Perempuan Dan Anak



Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan dan Kecamatan
(JMKM atau Lainnya)



Kegiatan responsif gender lainnya

Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yang diasilkan selama 1 -2 tahun terakhir





BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan PROFIL KECAMATAN RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KRPPA ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta responsivitas gender KECAMATAN.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil KRQ sinergi dengan KRPPA ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga KECAMATAN dan masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak.